

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perubahan perencanaan jangka menengah dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magelang menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (RPJM Nasional 2014-2019) dan Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah serta Rencana Strategis Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019. Perubahan ini berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang serta Peraturan Bupati Magelang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah dimana Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magelang berubah nama menjadi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 disusun sebagai komitmen perubahan perencanaan jangka menengah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang selama kurun waktu Tahun 2014-2019.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 tersebut akan menjabarkan secara komprehensif misi kelima Bupati yang diemban oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai salah satu komponen di dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Magelang, maka Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang menduduki tempat yang sangat vital dan strategis, karena Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang berfungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dengan demikian kemampuan dan pemahaman yang komprehensif dalam menyikapi kondisi lingkungan strategis Pemerintahan Kabupaten Magelang menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dalam meningkatkan eksistensinya.

Memahami kondisi lingkungan strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, secara faktual dapat dikatakan menghadapi banyak permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian secara konkrit dan konsisten, terutama dalam upaya percepatan penyelenggaraan otonomi di daerah. Permasalahan yang timbul sebagai implikasi penerapan otonomi daerah tersebut, akan memiliki dimensi yang luas dan bersifat komplikatif, khususnya yang menyangkut aspek-aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar berjalan secara efektif dan efisien sangat diperlukan adanya pengelolaan terhadap pendapatan, keuangan dan aset daerah, dengan memadukan perencanaan yang visioner.

Mengingat peran penting dimaksud, maka Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang harus mampu mengakomodir semua peran dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk sebagai acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka perlu disusun perubahan Renstra dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas yang baru yaitu membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembarah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembarah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 64);
10. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/170/KEP/24/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 adalah sebagai panduan dan dasar pelaksanaan dalam penyiapan instrumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan dan strategi pencapaian program kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini berfungsi untuk menuntun unit-unit kerja penyelenggara kegiatan di lingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang, sehingga dapat terselenggara secara optimal,

terfokus dan terarah berdasarkan seluruh indikator kebijakan yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari Perubahan Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

- a. untuk mengetahui kondisi obyektif Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang secara keseluruhan serta konstelasi Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Magelang pada saat ini, sekaligus untuk memahami arah dan tujuan dari Institusi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- b. untuk memudahkan seluruh unit-unit kerja pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dalam menyusun rencana program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur guna tercapainya arah dan tujuan yang ditetapkan;
- c. untuk memudahkan seluruh jajaran institusi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dan Instansi terkait lainnya, serta untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan tugas pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang selama periode 5 (lima) tahun;
- d. untuk mendorong agar seluruh jajaran pejabat dan pejabat fungsional umum di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang khususnya, serta Jajaran Pejabat dan Pejabat fungsional umum Pemerintah Kabupaten Magelang pada umumnya, agar tetap konsisten untuk menggalang kerjasama serta koordinasi antar komponen dan antar instansi dalam menyusun kegiatan dan program tahunan.

- e. untuk dipergunakan sebagai tolok ukur dalam penilaian dan pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas tahunan selama periode 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang pengertian Perubahan Renstra, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta keterkaitan Renstra dengan RPJMD, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, sistematika penulisan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini memaparkan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan SKPD, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD (SDM, asset/modal), memuat struktur organisasi, tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme) serta tupoksi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, hambatan utama serta solusi untuk mengatasinya.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi terkait visi, misi serta program KDH dan wakil KDH terpilih, factor penghambat dan pendorong untuk mencapai visi dan misi dan kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan tujuan, sasaran dan kebijakan SKPD tahun 2014-2019 harus jelas menunjukkan yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD dalam upaya menuwujudkan visi dan misi KDH maupun dalam upaya

mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan serta rumusan strategi dan kebijakan SKPD selama 5 (lima) tahun.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR.

Bab ini merumuskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk tahun 2014 – 2019.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Bab ini menguraikan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP.

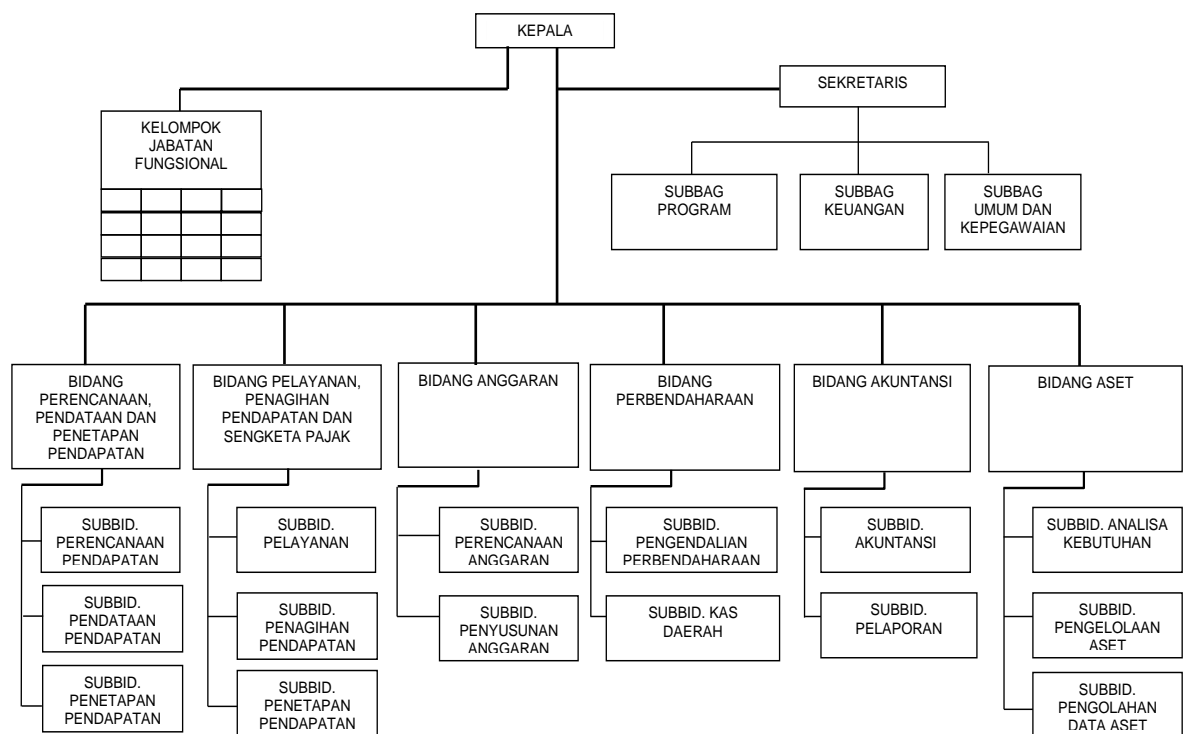
Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi dan peran dari dokumen Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAGELANG

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang bahwa Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Bagan Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Sementara Fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset, dan kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan pelayanan di bidang keuangan;
- e. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
- g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang keuangan perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang membawahi Sekretariat dan 6 (enam) Bidang sebagai berikut :

- a. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Subbag Program
 2. Subbag Keuangan
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian

- b. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Penetapan Pendapatan membawahi 3 (tiga) Subbid, yaitu :
 - 1. Subbid Perencanaan Pendapatan
 - 2. Subbid Pendataan Pendapatan
 - 3. Subbid Penetapan Pendapatan
- c. Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan dan Sengketa Pajak 3 (tiga) Subbid, yaitu :
 - 1. Subbid Pelayanan
 - 2. Subbid Penagihan Pendapatan
 - 3. Subbid Verifikasi dan Sengketa Pajak
- d. Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Subbid, yaitu :
 - 1. Subbid Perencanaan Anggaran
 - 2. Subbid Penyusunan Anggaran
- e. Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Subbid, yaitu :
 - 1. Subbid Pengendalian Perbendaharaan
 - 2. Subbid Kas Daerah
- f. Bidang Akuntansi membawahi 2 (dua) Subbid, yaitu :
 - 1. Subbid Akuntansi
 - 2. Subbid Pelaporan
- g. Bidang Aset membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Analisa Kebutuhan
 - 2. Seksi Pengelolaan Aset
 - 3. Seksi Pengolahan Data Aset
- h. Rincian Tupoksi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dapat dijabarkan lebih lengkap sebagai berikut :

- Nama : KEPALA BADAN PENDAPATAN. PENGELOLAAN
Jabatan KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dalam
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.
- Rincian :
1. Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja,
dan anggaran Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
2. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang,
memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan
tugas bawahan.
3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah.
4. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan
pedoman teknis di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan,
pendataan, dan penetapan pendapatan.
6. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan,
penagihan pendapatan, dan sengketa pajak.
7. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan
anggaran.
8. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan
perbendaharaan.
9. Menyelenggarakan kegiatan penatausahaan
akuntansi dan pelaporan.
10. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan aset.

11. Melakukan pembinaan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
12. Menyelenggarakan fasilitasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
13. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
14. Menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
15. Mengendalikan rekomendasi untuk pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
16. Menyelenggarakan kegiatan pengawasan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
17. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
18. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Nama : SEKRETARIS
- Jabatan
- Tugas : Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
- Rincian :
1. Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
 2. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
 3. Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan teknis dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
 4. Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan.
 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
 6. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

7. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran.
8. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
9. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan.
10. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan.
11. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.
12. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
13. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
14. Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

15. Memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
16. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
17. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Nama : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENDATAAN, DAN
Jabatan PENETAPAN PENDAPATAN
- Tugas : Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan,
Pendataan, dan Penetapan Pendapatan yang meliputi
perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan,
pendataan dan penetapan pendapatan, dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.
- Rincian :
 1. Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja,
dan anggaran Bidang Perencanaan, Pendataan,
dan Penetapan Pendapatan.
 2. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang,
memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan
tugas bawahan.
 3. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana
kegiatan pengolahan pendapatan daerah.
 4. Merumuskan pedoman teknis pengelolaan
pendapatan daerah.
 5. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait
pendapatan.
 6. Mengkoordinasikan perencanaan pendapatan.
 7. Mengkoordinasikan kegiatan intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan.
 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan
laporan realisasi pendapatan daerah.
 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi
pendapatan daerah dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

10. Mengkoordinasikan pelaksanaan permohonan pembetulan dan penghapusan ketetapan dan atau objek pajak dan retribusi daerah.
11. Mengkoordinasikan pengendalian operasional pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
12. Mengkoordinasikan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dokumen sumber-sumber pendapatan daerah.
13. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Penetapan Pendapatan.
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Nama : KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENAGIHAN
- Jabatan : PENDAPATAN, DAN SENGKETA PAJAK
- Tugas : Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan dan Sengketa Pajak yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan, penagihan dan sengketa pendapatan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Rincian :
 1. Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan dan Sengketa Pajak.
 2. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
 3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan, penagihan pendapatan dan sengketa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 4. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pelayanan, penagihan, verifikasi dan sengketa pajak daerah.
 5. Mengkoordinasi kegiatan pelayanan, penagihan, verifikasi dan sengketa pajak daerah.
 6. Mengkoordinasikan penatausahaan pelayanan, penagihan, verifikasi dan sengketa pajak daerah.
 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian piutang pajak daerah dan retribusi daerah.
 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

9. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan dan Sengketa Pajak.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Nama : KEPALA BIDANG ANGGARAN
- Jabatan
- Tugas : Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Anggaran yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta penjabarannya dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Rincian :
1. Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Anggaran.
 2. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
 3. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan RAPBD Perubahan beserta penjabarannya.
 4. Merumuskan kebijakan teknis penyusunan Analisa Standar Belanja dan Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
 5. Mengkoordinasikan pengumpulan, klasifikasi, analisa data dan pemecahan masalah dalam perencanaan dan penyusunan RAPBD.
 6. Mengkoordinasikan penyiapan Rancangan Penyusunan KUA/PPAS, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta penjabarannya.
 7. Mengkoordinasikan penyiapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD), Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta penjabarannya.

8. Mengkoordinasikan Penyusunan RKA/ DPA/DPPA SKPD / PPKD/BLUD.
9. Mengkoordinasikan Penggeseran DPA/DPPA SKPD/ PPKD/BLUD.
10. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran.
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Nama : KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
- Jabatan
- Tugas : Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perbendaharaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Rincian :
1. Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Perbendaharaan.
 2. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
 3. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan perbendaharaan.
 4. Merumuskan kebijakan anggaran kas.
 5. Menyelenggarakan pembinaan kepada SKPD berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.
 6. Melakukan pembayaran berdasarkan Permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah.
 7. Melaksanakan penempatan keuangan daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah.
 8. Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
 9. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP).

10. Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran kas, dan penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) dalam rangka manajemen kas.
11. Mengkoordinasikan realisasi pendapatan dan pengendalian belanja daerah.
12. Mengkoordinasikan penyimpanan benda-benda berharga dan surat-surat berharga.
13. Mengkoordinasikan pengelolaan utang dan piutang daerah.
14. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Nama : KEPALA BIDANG AKUNTANSI
- Jabatan
- Tugas : Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang akuntansi dan pelaporan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Rincian :
 1. Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Akuntansi.
 2. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
 3. Merumuskan kebijakan sistem dan prosedur akuntansi.
 4. Merumuskan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
 5. Menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.
 6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD.
 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah.
 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan sistem akuntansi daerah kepada SKPD.
 10. Mengkoordinasikan penyajian informasi keuangan daerah.
 11. Mengkoordinasikan penyusunan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

12. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Nama : KEPALA BIDANG ASET
- Jabatan
- Tugas : Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Aset yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan barang milik daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Rincian :
 1. Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Aset.
 2. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
 3. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah.
 4. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.
 5. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan penyimpanan dan penyaluran, pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.
 6. Mengkoordinasikan penggunaan, pemanfaatan pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembiayaan barang milik daerah.
 7. Mengkoordinasikan penatausahaan dan tuntutan ganti rugi barang milik daerah.
 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaporkan kegiatan pengelolaan barang milik daerah.

9. Melaksanakan pemantauan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Aset.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

2.2.1. Potensi SDM

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh adanya modal dasar yaitu SDM (*human capital*) yang dimiliki. Keberhasilan pencapaian kinerja tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan yang mendalam (*hardskill* atau *hard competence*), akan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap, watak dan perilaku yang dimiliki oleh para pegawai dalam menghadapi pekerjaan (*softskill*). Maka dari itu, pengembangan pegawai agar bisa menjadi modal dasar untuk tercapainya sebuah tujuan, sangat diperlukan adanya sumber daya manusia (SDM) yang handal, karena dengan adanya SDM yang handal akan menjadi bagian penting dalam pengelolaan organisasi. Untuk mendapatkan SDM yang handal, maka perlu diadakan pendidikan dan pelatihan pegawai. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan *human capital* meliputi kegiatan identifikasi jenis pekerjaan strategis yang ada, mendefinisikan profil kompetensi yang harus dimiliki SDM serta membuat kalkulasi (*assessment*) atas kompetensi SDM yang ada dan membangun program pengembangan SDM (*human capital development*) yang meliputi pelatihan dan penilaian kesiapan organisasi.

Dalam posisinya yang sangat menentukan sebagai *agent of change*. SDM dituntut memiliki kemampuan yang memadai, baik dari segi ilmu pengetahuan (*basic competence*), keterampilan dan keahlian (*value of competence*), maupun profesionalitas (*code of*

conduct). Faktor kemampuan tersebut dibutuhkan di setiap bidang tugas guna mendukung terwujudnya peran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang sebagai pengelola keuangan dan kekayaan serta aset daerah demi tercapainya tujuan dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, untuk pencapaian tujuan organisasi pada tingkat optimum, yaitu adanya tuntutan terhadap faktor kemampuan SDM menyangkut ketiga hal yaitu kemampuan, keterampilan dan keahlian serta profesionalitas perlu dijawab dengan proses penyiapan SDM secara baik dan profesional. Adapun langkah yang perlu dilakukan terkait dengan faktor kemampuan adalah menyandingkan peta kompetensi SDM yang ada dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian perlu proses kalkulasi (*assessment*) kompetensi secara benar.

Memperhatikan kebutuhan SDM unggul dengan spesifikasi dan diversifikasi kompetensinya, diyakini bahwa perencanaan SDM yang baik sejak pengadaan, pembinaan, pengembangan serta penajaman keahlian merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan seimbang, tidak saja dengan tuntutan kebutuhannya, tetapi juga dengan faktor-faktor yang dapat memotivasi SDM untuk menunjukkan kinerja sesuai yang diharapkan. Dengan kedudukan tersebut, SDM menempati posisi sentral di antara 4 (empat) aspek penting lainnya, yakni aspek hukum, aspek organisasi, aspek sistem dan prosedur dan aspek sarana dan prasarana. Upaya memahami posisi SDM saat ini baik dari segi kuantitas, kualitas, ragam kompetensi maupun penyebarannya sangat penting dalam mempersiapkan kelangsungan proses perencanaan dan pertumbuhan SDM yang diinginkan untuk kurun waktu tertentu di masa datang, seiring dengan tuntutan kebutuhan pencapaian tujuan organisasi. Dengan mengetahui posisi tersebut kita dapat mengukur kemampuan serta menjadikan posisi tersebut sebagai barometer dalam penetapan target pencapaian tiap-tiap sasaran yang membutuhkan dukungan SDM. Peta pencapaian sasaran akan dengan sendirinya menunjukkan apa dan berapa kekuatan SDM yang dibutuhkan dalam kurun tertentu dan bagaimana

pertumbuhan yang diharapkan terjadi. Oleh karena itu, kejelasan kebutuhan SDM terkait dengan jumlah dan komposisi turut pula menentukan langkah pengelolaan yang harus dilakukan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kejelasan tersebut di sisi lain membantu dan memungkinkan kita dapat memanfaatkan SDM yang ada secara optimal dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi dan terkendali. Dengan demikian, proses pertumbuhan SDM dapat berjalan secara terencana dan terukur. Dukungan SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang sangat penting, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dengan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai, maka upaya untuk mencapai tujuan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang akan semakin mudah. Dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang terdapat 26 jabatan struktural baik eselon II, III maupun eselon IV. Secara rinci sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
SDM Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Jabatan		Eselon	Kondisi Riil	Formasi
1	2		3	4	5
1	Struktural	Kepala Dinas	II.A	1	1
		Sekretaris	III.A	1	1
		Kepala Bidang	III.B	6	6
		Kepala Sub.Bid / Sub Bagian	IV.A	18	18
2	Fungsional Umum	Staf	-	83	100
3	Fungsional Tertentu	Staf	-	5	5
Jumlah				114	131

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bulan April 2016

Sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.1 personil atau pegawai pada BPPKAD Kabupaten Magelang sebanyak 114 orang. Dari jumlah tersebut terdiri dari 26 orang pejabat struktural dan 88 orang pejabat fungsional umum/fungsional tertentu. Dilihat dari jenjang pendidikannya, SDM pada BPPKAD mayoritas merupakan lulusan S1 dan S2 (44,74%). Secara lebih rinci sebagaimana pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

Jenjang Pendidikan SDM Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

No.	Uraian	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1.	Pasca sarjana (S.2)	13	11,40
2.	Sarjana (S.1)	39	33,34
3.	Diploma 3/Akademi	12	9,65
4.	SLTA	47	39,48
5.	SLTP	6	5,26
6.	SD	1	0,87
JUMLAH		114	100,00

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bulan April 2016.

Sedangkan SDM pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dilihat dari golongan atau kepangkatannya, mayoritas berada pada golongan III sebanyak 52,54% dan golongan II sebanyak 36,44%. Secara lebih rinci sebagaimana pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

SDM pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	Golongan IV	7	5,94
2.	Golongan III	60	52,54
3.	Golongan II	41	36,44
4.	Golongan I	6	5,08
JUMLAH		114	100,00

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang bulan April 2016

Sementara itu jika ditinjau dari sisi Gender, maka SDM pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang terdapat 74 pegawai berjenis kelamin laki-laki yang terdiri dari 13 pejabat struktural dan 61 jabatan fungsional umum. Sementara itu jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 40 orang yang terdiri dari 13 pejabat struktural dan 27 jabatan fungsional umum. Komposisi tersebut tersaji pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

SDM pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin

No.	Keterangan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Pejabat Struktural	13	13
2.	Jabatan Fungsional Umum/ Tertentu	61	27
JUMLAH		74	40

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang bulan April 2017

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pencapaian tujuan/hasil tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sangat berperan untuk mendukung kinerja SDM pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang meliputi berbagai macam jenis sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana pada Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

No	Jenis Sarana Prasarana	Tahun 2017	
		Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	AC	45	Unit
2	Bangunan Kantor	1	Gedung
3	Brangkas	9	Unit
4	CCTV	12	Buah
5	Cermin Besar	-	Buah
6	Converter	-	Buah
7	CPU / PC Unit	78	Buah
8	Dispenser	11	Buah
9	DVD Player	1	Buah
10	Filling Cabinet	69	Buah
11	Jam Dinding	12	Buah
12	Kamera Digital	2	Buah
13	Kendaraan Roda 2	50	Buah
14	Kendaraan Roda 4	14	Buah
15	Kipas	20	Buah
16	Kotak Saran	6	Buah
17	Kulkas	2	Buah
18	Kursi / Kursi Sice	393	Buah
19	Laptop / Notebook / Iphone	47	Buah
20	LCD Proyektor	7	Buah
21	Lemari / Almari Arsip	101	Buah
22	Meja	260	Buah
23	Mesin Hitung	6	Buah
24	Mesin Ketik	13	Buah
25	Mesin Laminating	-	Buah
26	Mesin Penghancur Kertas	3	Unit
27	Mesin Porporasi / Nomor Seri	6	Buah
28	Mesin Stensil	-	Buah
29	Monitor	40	Buah
30	Papan Pengumuman	7	Buah
31	Papan White Board	9	Buah
32	Pemotong Kertas	1	Unit
33	Plotter	1	Unit
34	Printer	115	Buah
35	Rak Arsip	114	Buah
36	Running Text	1	Unit
37	Server	13	Unit
38	Tabung Pemadam Kebakaran	14	Buah
39	Telepon / Fax	22	Unit
40	Televisi	2	Buah
41	UPS	64	Buah
42	Vidio Camera	2	Unit
43	Wireless	6	Buah

*Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang
bulan April 2017*

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Bila melihat struktur organisasi, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peran dan fungsi setiap SKPD di bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah, sehingga peran dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang saat ini dan dimasa mendatang akan sangat strategis dalam mendukung tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Magelang.

Dengan segala kendala dan keterbatasan untuk mewujudkan pelaksanaan ideal dimaksud, maka pola dan alur kerja di atas diharapkan dapat terwujud dalam rangka aktualisasi dan reorientasi peran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang, khususnya dalam mendukung pendapatan, keuangan dan aset daerah.

Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi dan mengantisipasi perubahan acuan bagi pelaksanaan kegiatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya yang akan dilaksanakan kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni Tahun 2014-2019.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk mendukung pengadministrasian pendapatan daerah telah diimplementasikan aplikasi Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA), aplikasi SISMIOP untuk PBB dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta aplikasi SIBPHTB untuk meningkatkan penerimaan BPHTB di Kabupaten Magelang. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang juga melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain melaksanakan ketugasan sebagaimana tersebut di atas, Badan

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang khususnya pada Bidang Pendapatan juga bertugas mengkoordinasikan SKPD penghasil.

Secara umum gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BPPKAD
Kabupaten Magelang

No	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek, diklat dan pelatihan lainnya				5 org	7 org	10 org	5 org	7 org	102 org	100%	100%	1020%
2	Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi dan latar belakang di bidang sistem informasi				2 org	3 org	5 org	2 org	3 org	5 org	100%	100%	100%
3	% peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien				90%	95%	95%	75%	75%	95%	83,33%	78,94%	100%
4	Presentase Peningkatan Porsi PAD terhadap Pendapatan Daerah		Ada		3,96%	4,0%	4,3%	20,32%	(0,79)%	5,41 %	513,13%	(19,75) %	125,81 %
5	Persentase Peningkatan PAD		Ada		12,02%	12,02%	12,02%	39,48%	8,24%	10,30 %	328,45%	68,55 %	85,69 %
6	Rancangan Perda dan Perda APBD selesai tepat waktu		Ada		100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	75%
7	Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah				WDP	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP	100%	100%	50%
8	Data Inventaris Aset sesuai dengan Neraca		Ada		100%	100%	100%	75%	98%	96%	75%	98%	96%

Sumber : Sub. Program Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang bulan April 2016

Berdasarkan Tabel 2.6 diatas dapat diketahui bahwa Dari tabel di atas, terdapat 8 indikator. Pada tahun 2016, sebanyak 7 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 75% dari total indikator. Sementara itu, sebanyak satu indikator belum memenuhi target yaitu masih 50 %, tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada indikator Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek, diklat dan pelatihan lainnya dengan persentase 1020 %, sementara indikator yang mengalami capaian yang paling rendah adalah indikator Opini BPK “WTP” terhadap Laporan Keuangan Daerah masih WDP (belum memenuhi target) pengecualian pada Aset Tetap. Pada tahun 2015 ada dua indikator yang belum memenuhi target yaitu Presentase Peningkatan Porsi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar – 19,75 % dan Persentase Peningkatan PAD sebesar 68,55 %. Pada tahun 2014 semua indikator memenuhi semua target kinerja.

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang sesuai Tugas Pokok dan Fungsi pada periode Tahun 2014-2016 juga dapat dilihat dari target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 mengamanatkan bahwa “Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah” sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Target PAD sebagaimana ditetapkan di dalam APBD telah menggambarkan potensi yang sebenarnya, karena penetapannya dilakukan melalui tahapan pendataan, perhitungan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan target pendapatan dari dana perimbangan ditetapkan setelah mengkonsultasikan dan mendapatkan informasi dari pemerintah pusat dan/atau dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pada periode Tahun 2014-2016 realisasi pendapatan daerah secara total mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar Rp. 126.878.534.799,00. Dalam periode tersebut realisasi pendapatan tertinggi pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.036.310.089.428,00 dikarenakan karena adanya kenaikan dari Dana Perimbangan yang cukup signifikan, sedangkan realisasi pendapatan yang terkecil terjadi pada Tahun 2014 sebesar Rp. 1.655.674.485.031. Hal ini menggambarkan capaian yang baik dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPPKAD (DPPKAD) pada periode 2014-2016 dari aspek peningkatan pendapatan daerah dimana hal ini tentunya ditopang oleh kinerja SDM yang dimiliki. Namun masih sangat dibutuhkan keseriusan, kerja keras, disiplin dan kepekaan yang lebih terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal dalam pengelolaan pendapatan daerah ke depan agar pertumbuhan pendapatan daerah selalu dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Gambaran tentang anggaran dan realisasi pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2014–2016 dapat diikuti pada Tabel 2.7 berikut ini

TABEL 2.7

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (PPKD) Kabupaten Magelang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke			Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			Rata-rata Pertumbuhan 2016-2017	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PENDAPATAN DAERAH	1.629.324.429.389	1.954.798.668.128	1.963.399.637.796	1.655.674.485.031	1.945.955.251.171	2.036.310.089.428	101,62%	99,55%	103,71%	111.358.402.802	126.878.534.799
Pendapatan Asli Daerah	198.117.604.076	232.532.835.584	276.334.438.862	242.448.677.267	261.569.091.783	288.485.678.128	122,38%	112,49%	104,40%	26.072.278.262	15.345.666.954
Dana Perimbangan	1.065.590.847.313	1.101.022.346.000	1.257.908.024.854	1.047.440.614.157	1.080.097.852.660	1.362.306.913.419	98,30%	98,10%	108,30%	64.105.725.847	104.955.433.087
Lain-lain Pendapatan Dearah yang Sah	365.615.978.000	621.243.486.544	429.157.174.080	365.785.193.607	604.288.306.728	385.517.497.881	100,05%	97,27%	89,83%	21.180.398.693	6.577.434.758
BELANJA DAERAH	2.002.563.822.687	2.226.627.483.960	2.458.434.806.064	1.655.060.222.422	1.744.730.814.575	2.073.797.409.332	82,65%	78,36%	84,35%	151.956.994.459	139.579.062.303
Belanja tidak langsung	1.174.657.329.419	1.470.524.125.231	1.511.337.488.567	1.035.366.891.293	1.197.532.083.049	1.375.873.412.336	88,14%	81,44%	91,04%	112.226.719.716	113.502.173.681
– Belanja Pegawai	955.693.909.252	1.143.984.953.000	1.058.403.753.273	889.340.550.538	943.109.496.758	956.765.652.145	93,06%	82,44%	90,40%	34.236.614.674	22.475.033.869
– Belanja bunga	-	-	-	-	-	-					
– Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-					
– Belanja hibah	44.720.988.500	25.473.737.000	16.837.980.000	43.450.618.035	3.802.955.000	13.632.820.000	97,16%	14,93%	80,96%	(9.294.336.167)	(9.939.266.012)
– Belanja bantuan sosial	13.457.970.000	13.332.175.000	41.853.480.000	12.284.003.660	12.917.126.200	38.705.455.000	91,28%	96,89%	92,48%	9.465.170.000	8.807.150.447
– Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kot a dan pemerintahan desa	1.314.494.000	12.569.280.910	11.565.363.790	1.314.494.000	12.544.867.910	11.487.236.256	100,00%	99,81%	99,32%	3.416.956.597	3.390.914.085
– Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kot a dan pemerintahan desa	89.094.795.000	224.813.572.484	353.831.066.500	88.073.727.060	223.848.656.231	353.508.455.935	98,85%	99,57%	99,91%	88.245.423.833	88.478.242.958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Belanja tidak terduga	70.375.172.667	50.350.406.837	28.845.845.004	903.498.000	1.308.980.950	1.773.793.000	1,28%	2,60%	6,15%	(13.843.109.221)	290.098.333
Belanja langsung	827.906.493.268	756.103.358.729	947.097.317.497	619.693.331.129	547.198.731.526	697.923.996.996	74,85%	72,37%	73,69%	39.730.274.743	26.076.888.622
- Belanja Pegawai	52.888.602.846	59.168.548.702	74.747.355.295	46.781.725.877	50.959.864.774	63.264.041.605	88,45%	86,13%	84,64%	7.286.250.816	5.494.105.243
- Belanja barang dan jasa	339.333.554.685	351.766.822.842	385.232.265.405	253.889.417.887	242.387.057.591	281.492.262.808	74,82%	68,91%	73,07%	15.299.570.240	9.200.948.307
- Belanja modal	435.684.335.737	345.167.987.185	487.117.696.797	319.022.187.365	253.851.809.161	353.167.692.583	73,22%	73,54%	72,50%	17.144.453.687	11.381.835.073
PEMBIAYAAN	373.239.403.298	271.543.815.832	495.035.168.268	373.304.850.248	291.579.273.672	495.056.510.682	100,02%	107,38%	100,00%	40.598.588.323	40.583.886.811
Penerimaan pembiayaan	429.034.403.298	374.129.112.857	547.380.168.268	429.099.850.248	374.164.570.697	547.401.510.682	100,02%	100,01%	100,00%	39.448.588.323	39.433.886.811
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	417.324.403.298	373.919.112.857	492.803.710.268	417.324.403.298	373.919.112.857	492.803.710.268	100,00%	100,00%	100,00%	25.159.768.990	25.159.768.990
- Pencairan dana cadangan	11.500.000.000	-	54.276.458.000	11.500.000.000	-	54.276.457.914	100,00%	#DIV/0!	100,00%	14.258.819.333	14.258.819.305
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-					
- Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-					
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman	210.000.000	210.000.000	300.000.000	275.446.950	245.457.840	321.342.500	131,17%	116,88%	107,11%	30.000.000	15.298.517
- Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-					
Pengeluaran pembiayaan	55.795.000.000	102.585.297.025	52.345.000.000	55.795.000.000	82.585.297.025	52.345.000.000	100,00%	80,50%	100,00%	(1.150.000.000)	(1.150.000.000)
- Pembentukan dana cadangan	46.000.000.000	91.521.930.000	41.000.000.000	46.000.000.000	71.521.930.000	41.000.000.000	100,00%	78,15%	100,00%	(1.666.666.667)	(1.666.666.667)
- Penyertaan modal (invenstasi) pemerintah sah	9.585.000.000	10.763.367.025	11.345.000.000	9.585.000.000	10.763.367.025	11.345.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	586.666.667	586.666.667
- Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-					
- Pemberian pinjaman daerah	210.000.000	300.000.000	-	210.000.000	300.000.000	-	100,00%	100,00%	#DIV/0!	(70.000.000)	(70.000.000)

Sumber : Bidang Akuntansi, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang bulan April 2016

TABEL 2.8

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke			Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			Rata-rata Pertumbuhan 2016-2017	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PENDAPATAN DAERAH	98.727.997.826	116.770.020.142	151.679.514.187	136.755.501.863	150.355.720.497	169.618.359.778	138,52%	128,76%	111,83%	17.650.505.454	10.954.285.972
Pendapatan Asli Daerah	98.727.997.826	116.770.020.142	151.679.514.187	136.755.501.863	150.355.720.497	169.618.359.778	138,52%	128,76%	111,83%	17.650.505.454	10.954.285.972
Dana Perimbangan			-								
Lain-lain Pendapatan Dearah yang Sah			-								
BELANJA DAERAH	65.597.684.000	46.363.816.200	37.931.747.180	43.376.322.000	37.519.257.950	33.565.611.369	66,12%	80,92%	88,49%	(9.221.978.940)	(3.270.236.877)
Belanja tidak langsung	11.893.359.000	12.803.294.000	12.752.201.790	10.579.493.418	11.011.550.915	11.966.650.302	88,95%	86,01%	93,84%	286.280.930	462.385.628
- Belanja Pegawai	11.893.359.000	12.803.294.000	12.752.201.790	10.579.493.418	11.011.550.915	11.966.650.302	88,95%	86,01%	93,84%	286.280.930	462.385.628
- Belanja bunga											
- Belanja Subsidi											
- Belanja hibah											
- Belanja bantuan sosial											
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kot a dan pemerintahan desa											
- Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kot a dan pemerintahan desa											
- Belanja tidak terduga											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja langsung	53.704.325.000	33.560.522.200	25.179.545.390	32.796.828.582	26.507.707.035	21.598.961.067	61,07%	78,98%	85,78%	(9.508.259.870)	(3.732.622.505)
- Belanja Pegawai	2.884.963.500	3.213.600.500	3.808.408.000	2.440.648.000	2.678.218.500	3.262.683.000	84,60%	83,34%	85,67%	307.814.833	274.011.667
- Belanja barang dan jasa	8.907.124.500	10.143.566.200	10.446.755.940	6.946.990.057	8.230.920.305	8.723.241.747	77,99%	81,14%	83,50%	513.210.480	592.083.897
- Belanja modal	41.912.237.000	20.203.355.500	10.924.381.450	23.409.190.525	15.598.568.230	9.613.036.320	55,85%	77,21%	88,00%	(10.329.285.183)	(4.598.718.068)
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	0				-	0
Penerimaan pembiayaan	-	-	-	-	-	0				-	
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya											
- Pencairan dana cadangan											
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan											
- Penerimaan pinjaman daerah											
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman											
- Penerimaan piutang daerah											
Pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-	-	0				-	0
- Pembentukan dana cadangan											
- Penyertaan modal (invenstasi) pemerintah sah											
- Pembayaran pokok utang											
- Pemberian pinjaman daerah											

Sumber : Bidang Akuntansi, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang bulan April 2016

Data-data pada Tabel 2.8 menunjukkan bahwa dari sisi kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah naik secara signifikan dengan rata-rata pertumbuhan Rp. 10.954.285.972,00 yang menggambarkan kerja keras di Bidang Pendapatan selama tiga tahun terakhir dan Belanja Daerah yang cenderung turun dengan rata-rata penurunan sebesar Rp. 3.270.236.877,00 yang menunjukkan efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2.9 berikut menyajikan perbandingan antara target dan realisasi PAD Kabupaten Magelang dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016. Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun tersebut pada setiap tahun terjadi peningkatan PAD dari target yang ditetapkan. Pelampauan tertinggi terjadi pada Tahun 2014 sebesar 122,4 % dan pelampauan terendah terjadi pada Tahun 2011 sebesar 100,2%.

Tabel 2.9
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2011-2016

Tahun	Target	Realisasi PAD (Rp.)	Peningkatan/Penurunan	
			Jumlah (Rp.)	%
2011	90.279.565.874	90.462.630.622,00	183.064.748,00	100,2
2012	107.064.480.721	123.722.781.349,00	16.658.300.628,00	115,6
2013	144.476.275.479	173.253.651.914,00	28.777.376.435,00	119,9
2014	198.117.604.076	242.448.677.267,00	44.331.073.191,00	122,4
2015	232.532.835.584	261.569.091.783,00	29.036.256.199,00	112,5
2016	276.334.438.862	288.485.678.128,00	12.151.239.266,00	104,4

Sumber : Bidang Akuntansi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Sementara itu, Tabel 2.10 dibawah ini menunjukkan realisasi Pendapatan Daerah dibandingkan dengan targetnya dari kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016. Hanya realisasi pada Tahun 2015 saja yang tidak mencapai target, yakni hanya mencapai 99,55%, sementara untuk tahun-tahun yang lain Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Magelang telah mencapai target yang diharapkan, bahkan

dapat melebihinya. Hal ini berkat adanya upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Tabel 2.10

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011-2016

Tahun	Target	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp.)	%
2011	1.093.497.365.637	1.114.474.635.599,00	101,9
2012	1.272.857.364.441	1.311.901.799.121,00	103,1
2013	1.408.473.392.704	1.428.243.260.343,00	101,4
2014	1.629.324.429.389	1.655.674.485.031,00	101,6
2015	1.954.798.668.128	1.945.955.251.171,00	99,55
2016	1.963.399.637.796	2.036.310.089.428,00	103,7

Sumber : Bidang Akuntansi, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

Tabel 2.11 berikut memaparkan angka prosentase kontribusi PAD terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah dari Tahun 2011 sampai dengan 2016. Dari prosentase pada Tabel dapat dilihat bahwa kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Magelang masih sangat kecil, berkisar 8,11% s/d 14,64%. Kenyataan ini yang mendorong Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang untuk semakin meningkatkan upaya untuk menggali potensi PAD yang ada sehingga diharapkan dapat mencapai kemandirian PAD sebesar 30% dari total Pendapatan Daerah.

Tabel 2.11

Kontribusi PAD Pada Pendapatan Daerah Tahun 20011-2016

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	% PAD
2011	1.114.474.635.599,00	90.462.630.622,00	8,11
2012	1.311.901.799.121,00	123.722.781.349,00	9,43

Tahun	Realisasi	Realisasi PAD (Rp.)	% PAD
2013	1.428.243.260.343,00	173.253.651.914,00	12,13
2014	1.655.674.485.031,00	242.448.677.267,00	14,64
2015	1.945.955.251.171,00	261.569.091.783,00	13,44
2016	2.036.310.089.428,00	288.485.678.128,00	14,16

Sumber : Bidang Akuntansi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

Prioritas pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal tersebut diharapkan dapat memberikan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah sekaligus peningkatan kinerja BUMD yang mendapatkan tambahan modal. Dijelaskan juga dalam bahwa dalam kinerja pelayanan DPPKAD pada pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD. Dari tabel 2.12 dapat dilihat bagian laba terbesar pada Bank Bapas 69 pada tiap tahunnya dari tahun 2011 s/d 2016. BUMD yang ada di Kabupaten Magelang antara lain PDAM, Bank BAPAS 69, BPR BKK Muntilan, dan PD. Aneka Usaha dan Bank Jateng.

Tabel 2.12
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun 2011-2015

Uraian	Realisasi Bagian Laba (Rp)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bagian Laba BUMD	7.902.020.082	9.060.433.218	10.740.005.583	12.540.994.826	14.979.432.303	17.643.061.538
Bank BAPAS 69	4.666.124.394	5.237.081.163	6.546.823.468	7.003.779.120	8.647.350.413	10.206.837.258
PD. Aneka Usaha	0	0	0	0	20.923.165	87.268.176
PDAM	1.269.019.400	1.682.681.550	1.774.055.250	1.877.767.650	2.524.706.250	3.284.027.450
BPR BKK Muntilan	178.665.074	417.305.707	542.935.801	739.516.647	1.032.293.993	945.391.344
Bank Jateng	1.788.211.214	1.723.364.798	1.876.191.064	2.919.931.409	2.754.158.482	3.119.540.310

Sumber : Bidang Akuntansi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

1. Penganggaran Daerah (APBD).

Dalam rangka penganggaran daerah, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang khususnya pada Bidang Anggaran telah mengkoordinasikan ke seluruh SKPD dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penyusunan Rancangan Perubahan APBD yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. KUA dan PPAS serta Perubahan KUA dan PPAS. Untuk mendukung ketugasan ini telah diimplementasikan Sistem Informasi Keuangan Daerah /SIMDA.

2. Penatausahaan Keuangan Daerah

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang khususnya pada Bidang Perbendaharaan dalam rangka penatausahaan keuangan daerah melaksanakan kegiatan, antara lain sebagai berikut :

- a. menerbitkan SPP gaji bagi PNS se Kabupaten Magelang sesuai dengan satuan kerja masing-masing secara bulanan;
- b. menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana) bagi seluruh SKPD;
- c. menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) bagi Seluruh SKPD;
- d. menerbitkan SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki masa pensiun maupun pindah ke luar Kabupaten Magelang.

Untuk mendukung ketugasan ini telah diimplementasikan aplikasi sistem penatausahaan keuangan daerah dan ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Pelaporan Keuangan Daerah

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang khususnya pada Bidang Akuntansi telah melaksanakan verifikasi seluruh surat pertanggungjawaban pendapatan, belanja maupun reklasifikasi aset dari seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil verifikasi, selanjutnya Bidang Akuntansi menyusun Laporan Keuangan Kabupaten dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Untuk mendukung ketugasan ini, maka mulai tahun 2009 telah dibangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pedoman dalam pelaksanaan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magelang. Dengan diberlakukannya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal, penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah harus dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015, mendasari regulasi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Magelang dan untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut maka Pemkab Magelang langsung melangkah dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perbup Nomor. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, dengan salah satu langkah konkrit melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan DIY dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan berbasis SAP menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) untuk pengelolaan Keuangan.

4. Pengelolaan Aset Daerah

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang khususnya pada Bidang Aset, juga mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. perencanaan kebutuhan barang dan aset daerah;
- b. inventarisasi barang dan aset daerah;
- c. kebutuhan sarana dan mobilitas berupa sepeda motor. mobil dinas dan mobil operasional;
- d. pemanfaatan dan pemeliharaan aset daerah untuk keperluan pemerintah daerah;
- e. penghapusan barang milik daerah yang dinilai sudah tidak layak atau tidak perlu karenadana pemeliharaan tinggi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan yang dilakukan BPPKAD tidak lepas dari pihak masyarakat dan peranan perangkat daerah lainnya mengingat peranan BPPKAD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan antara lain pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Magelang.

Tantangan yang dialami BPPKAD Kabupaten Magelang antara lain:

1. Target pendapatan daerah yang selalu naik;
2. Adanya peraturan perundang baru yang berdampak pada turunnya PAD;
3. Terbatasnya jumlah DAU dan DAK dari pusat;
4. Masih melekatnya budaya *segan dan apatis* dalam penyampaian pendapat.

Adapun peluang yang dapat menjadi keuntungan dalam melaksanakan pelayanan antara lain:

1. Adanya dukungan pimpinan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap eksistensi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dalam mendukung pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Adanya dorongan yang kuat dari SKPD dan lintas sektor yang lain;
3. Adanya tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Adanya tuntutan masyarakat dalam peningkatan pelayanan khususnya pelayanan pajak daerah;
5. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu alternative meningkatkan hasil pelayanan;
6. Diberlakukannya sistem anggaran berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD

Teknik pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisis lingkungan strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang adalah teknik analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, threats*) yang selanjutnya akan diidentifikasi dan diinteraksi dari masing-masing keempat alat analisis yaitu kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebelum dilakukan analisis, perlu diketahui gambaran dan kondisi yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang, baik kondisi eksternal yang berkaitan dengan dukungan komponen dan lembaga lain dalam pelaksanaan tupoksi, sarana dan prasarana, dan kondisi yang akan diharapkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.

Untuk melengkapi gambaran kondisi saat ini serta berbagai permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang, berikut dijabarkan analisis situasi baik internal dan eksternal. Analisis situasi tersebut selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum, analisis situasi internal bertujuan untuk memetakan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dihadapi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Pemetaan kekuatan dan kelemahan ini untuk memahami potensi dan permasalahan internal yang dihadapi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan analisis situasi eksternal bertujuan untuk memetakan peluang (*opportunities*) dan ancaman atau tantangan (*threats*) yang dihadapi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan analisis situasi eksternal ini diharapkan bisa mengidentifikasi peluang apa saja yang ada untuk mewujudkan visi dan misi serta tantangan atau ancaman yang bisa menjadi hambatan.

Dari gambaran dan kondisi yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat diuraikan berdasarkan 2 (dua) aspek, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Kelembagaan.

Ditinjau dari aspek kelembagaan, permasalahan yang masih ditemui yaitu berbagai permasalahan yang terjadi dimasa lampau belum sepenuhnya dapat teratasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka komitmen untuk memajukan eksistensi peran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang sangat bergantung pada dua hal berikut :

- a. sejauh mana jajaran pimpinan dan komponen mau dan berkeinginan untuk mendorong Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang, baik yang bersifat strategis maupun operasional, sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan;
- b. sejauh mana Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang tanggap dan mampu menyelesaikan tupoksinya dengan baik untuk mendukung pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Magelang agar berjalan secara efektif dan efisien khususnya di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kedua karakteristik di atas sangat mempengaruhi kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang ke depan, dan untuk memenuhinya sangat diperlukan dukungan eksternal dari lingkungan komponen SKPD Pemerintah Kabupaten Magelang, serta kemampuan internal untuk menghasilkan output pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang berkualitas.

2. Aspek Sumber Daya Manusia.

Sampai dengan bulan April 2016 jumlah pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang, sebanyak 114 orang, dengan rincian sebagai berikut : Pejabat Struktural sebanyak 26 orang, Pejabat fungsional umum 85 orang dan fungsional tertentu sebanyak 3 orang. Jumlah tersebut belum seimbang apabila dibandingkan dengan beban kerja sesuai Tupoksi yang ada pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia tersebut, maka untuk mengembangkan kemampuan melalui pendidikan formal, pendidikan struktural, maupun diklat-diklat teknis terkait lainnya perlu diadakan secara kontinyu. Hal ini perlu dilaksanakan karena dengan peningkatan Sumber Daya Manusia akan sangat menunjang kinerja Aparatur Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang untuk melaksanakan Tupoksi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.

Sebagai representasi dari fungsi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di tubuh Pemerintah Kabupaten Magelang, maka Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah yang berkompeten dan mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya terlihat dalam tabel 3.1. Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa permasalahan utama yang masih sering ditemui dari aspek Sumber Daya Manusia antara lain :

- a. dengan makin meningkatnya intensitas kegiatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang, maka dukungan Sumber Daya Manusia dirasakan masih kurang atau belum memadai;
- b. masih kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia terhadap teknologi;
- c. masih kurangnya pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia;

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
BPPKAD Kabupaten Magelang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal(Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	1. Terbatasnya pejabat fungsional umum yang telah mengikuti diklat/magang maupun yang berlatar belakang pendidikan formal di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.	1. Pejabat eselon II dan III minimal berpendidikan Strata 2, pernah mengikuti diklat ataupun magang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Pejabat eselon III dan IV memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Belum adanya sistem pengembangan SDM pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah yang terintegrasi dan konsisten	1. Keterbatasan jumlah PNS lingkup Pemkab yang memiliki spesifikasi khusus di bidang pengelolaan keuangan daerah 2. Perubahan peraturan dari pemerintah pusat tentang keuangan yang sangat cepat/terlalu sering	1. Terbatasnya pejabat fungsional umum DPPKAD yang mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2. Terbatasnya pejabat fungsional umum DPPKAD yang telah mengikuti diklat/magang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan perubahan regulasi dari pusat.
	2. Hanya sebagian pejabat aparatur BPPKAD yang memiliki tingkat pendidikan sesuai	1. minimal berpendidikan S1 dan pernah mengikuti diklat/magang perencanaan	1. Perlunya tambahan tenaga teknis berlatar belakang akuntansi	1. Rendahnya respon terhadap kebutuhan pengembangan kapasitas aparatur	3. Terbatasnya pejabat fungsional umum DPPKAD yang

1	2	3	4	5	6
					<p>4. menguasai Teknologi Informasi dalam mendukung pelaksanaan tupoksi DPPKAD</p> <p>Jabatan Eselon IV pada DPPKAD masih di isi oleh pejabat dengan tingkat pendidikan formal yang tidak sesuai.</p>
<p>Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>1. PAD belum optimal</p>	<p>1. Peningkatan persentase porsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah</p>	<p>1. Jumlah SDM yg kurang (Petugas Pemungut Pajak)</p> <p>2. Koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan belum optimal</p> <p>3. Tidak seluruh pegawai memahami peraturan tentang pajak dan retribusi daerah</p> <p>4. Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi belum di kelola secara efisien</p> <p>5. Penegakan perangkat aturan belum optimal.</p> <p>6. Kurangnya kajian potensi</p>	<p>1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak</p> <p>2. Ketersediaan data dasar potensi pendapatan masih terbatas</p> <p>3. Beberapa SKPD tidak mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, yang merupakan salah satu ukuran kinerja dan keberhasilan SKPD terkait</p> <p>4. Tidak seluruh masyarakat</p>	<p>1. Porsi PAD terhadap total pendapatan masih bisa ditingkatkan</p> <p>2. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan Koordinasi Pendataan program antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;</p> <p>3. Belum optimalnya penegakan perangkat peraturan /regulasi tentang pajak dan retribusi</p>

1	2	3	4	5	6
			PAD	memahami peraturan tentang pajak dan retribusi daerah Kemauan baik dari masyarakat untuk memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan daerah belum dapat di realisasi karena kurangnya ketegasan penegakan regulasi yang ada.	4. Masih Banyak Potensi Pendapatan yang belum dapat di ambil / terdata untuk meningkatkan PAD.
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Belanja Daerah	1. Porsi Belanja Tidak Langsung lebih besar dari Belanja Langsung	1. APBD Kabupaten Magelang yang telah di tetapkan	1. Terbatasnya pendapatan daerah untuk membiayai belanja, sementara kebutuhan belanja yang sifatnya wajib pada BTL sangat tinggi	1. Regulasi Pemerintah Pusat yang mengakibatkan kenaikan pada belanja tidak langsung	1. Pemda belum dapat memenuhi tuntutan pusat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengalokasikan Belanja Langsung dalam porsi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung.
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	1. Sebagian besar aset daerah belum diinventarisir	1. Peraturan dan Dokumen yang mengatur tentang aset daerah	1. kurang tertibnya pemanfaatan aset daerah 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah	1. kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam menggunakan aset pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah

1	2	3	4	5	6
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang	1. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang	1. Temuan BPK atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah khususnya pada aset tetap	1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan Hasil Temuan BPK 2. Koordinasi antar SKPD yang masih rendah	1. Untuk mencapai Opini BPK menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan menyelesaikan seluruh temuan BPK.

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam menjalankan fungsinya, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah yang terpilih, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, maka Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 memiliki keterkaitan terhadap pencapaian Visi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 sebagai kesinambungan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan itu maka pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 ditetapkan Visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju Dan Amanah)”.

Semanah yang dimaksud disini memiliki arti yang sama dengan “sehati”; dimaksudkan agar terjalinkebersamaan di Kabupaten Magelang antar dan inter pimpinan pemerintah daerah dan jajarannya beserta segenap komponen masyarakatnya untuk mewujudkan Kabupaten Magelang yang semakin Sejahtera, Maju dan Amanah. **Sejahtera** sendiri menunjukkan suatu kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yakni masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiiil) maupun kebutuhan sosial (spiritual). **Maju** artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing, berperadapan, professional serta berwawasan kedepan yang luas. Sementara **Amanah** berarti menciptakan kerjasama yang baik dengan semua elemen masyarakat serta mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran.

Setelah Visi ditetapkan, untuk mendukung terwujudnya Visi tersebut maka pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 ditetapkan Misi-Misi. Ada 6 (enam) Misi yang ditetapkan, yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia dan kehidupan beragama.

Misi ini didukung oleh 10 (sepuluh) urusan yang terdiri dari Kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Ketransmigrasian.

2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.

Misi ini didukung oleh 9 (Sembilan) urusan yaitu Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Industri, dan Pariwisata.

3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Misi ini didukung oleh 4 (empat) urusan, yakni Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Perhubungan.

4. Memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Misi ini didukung oleh 3 (tiga) urusan, yaitu Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.

Misi ini didukung oleh 7 (tujuh) urusan yaitu Perencanaan Pembangunan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Pertanahan.

6. Meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat.

Misi ini didukung oleh 1 (satu) urusan yaitu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Dari keenam Misi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 tersebut, yang dapat dijabarkan dalam tugas dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang adalah Misi V.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang mempunyai tugas untuk membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang berfungsi untuk menyelenggarakan tugas yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Adapun fungsi dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset, dan kesekretariatan;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
3. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan pelayanan di bidang keuangan;
5. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
6. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
7. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
8. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang keuangan perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset; dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang tersebut, ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2014-2019. Faktor-faktor tersebut terangkum dalam Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi, Dan Program Kerja Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi : **TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGELANG YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MAJU DAN AMANAH**

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi V Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis			
1. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Proses pengelolaan keuangan yang dihasilkan belum optimal	1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan retribusi. 2. Kurangnya komitmen beberapa SKPD yg memiliki pendapatan dalam mencapai target. 3. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang pendapatan, pengelolaan	1. Tersedianya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. 2. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (Simda). 3. Komitmen pimpinan dan semua pejabat fungsional umum untuk melaksanakan tugas

		keuangan & aset daerah. 4. Kurang optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 5. Regulasi pusat terkait dana perimbangan untuk pemda	
--	--	---	--

3.3 Telaahan Renstra DPPAD Dan Biro Keuangan Pada Setda Provinsi Jawa Tengah

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Magelang, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu memperhatikan Renstra DPPAD dan Biro Keuangan pada Setda Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan dan substansi Renstra DPPAD dan Biro Keuangan pada Setda Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh yang signifikan dalam pencapaian Visi dan Misi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Hal tersebut berkaitan dengan penganggaran dan tuntutan dari regulasi tentang perencanaan dan akuntabilitas kinerja.

Visi DPPAD Propinsi Jawa Tengah adalah :

”Menjadi Badan Yang Transparan Dan Akuntabel Didukung Oleh Pelayanan Prima Dalam Mewujudkan Optimalisasi Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Yang Berdaya Guna”.

Visi DPPAD Propinsi Jawa Tengah ini didukung oleh misi, tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan. Secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Misi :

1. Meningkatkan kualitas SDM.
2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi.

3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur.
 4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik.
 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
 6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah.
 7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
 8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
 9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.
- b. Tujuan :
1. Mewujudkan SDM yang memiliki kompetensi, profesional, dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan.
 2. Mewujudkan tata kelola administrasi yang cepat, mudah, efisiensi dan efektif.
 3. Mewujudkan tata kerja sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik.
 4. Mewujudkan pelayanan yang baik, aparatur yang disiplin, beretos kerja tinggi, inovatif dan berprestasi.
 5. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan pelayanan.
 6. Mewujudkan pendapatan pajak daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.
 7. Mewujudkan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain sesuai dengan target yang ditetapkan.
 8. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien.
 9. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah guna memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.
- c. Sasaran :
1. Meningkatnya kapasitas dan produktifitas kerja aparatur.
 2. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan.
 3. Tersajinya informasi yang cepat, lengkap dan akurat.
 4. Meningkatnya kepuasan publik .

5. Meningkatnya ketepatan, kecepatan dan efisiensi kerja.
 6. Terwujudnya suasana kerja yang kondusif, meningkatnya produktivitas kerja dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
 7. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana utama dan pendukung, pelayanan sehingga terwujud peningkatan kepuasan pelayanan publik.
 8. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah.
 9. Peningkatan pendapatan daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-lain.
 10. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah.
 11. Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset daerah.
 12. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset.
- d. Strategi :
1. Memberikan kesempatan studi lanjut, pendidikan penjejaran, kursus, menyelenggarakan bimbingan teknis, rapat teknis, dan studi komparasi.
 2. Meningkatkan kapasitas perangkat keras dan mengembangkan perangkat lunak sesuai kebutuhan.
 3. Meningkatkan komitmen seluruh level manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik).
 4. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan tugas secara konsisten dan memberikan *rewards and punishment*.
 5. Merehabilitasi dan atau membangun gedung baru, serta menyediakan sarana pendukung yang memadai.
 6. Meningkatkan pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak daerah secara konsisten.
 7. Meningkatkan pelaksanaan ketentuan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain secara konsisten.
 8. Mengadministrasikan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku secara profesional berbasis teknologi.
 9. Memasarkan asset daerah yang lebih efektif dan efisien.

e. Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas kompetensi, profesional, dan produktifitas SDM dengan:
 - 1) Menugaskan pegawai tugas belajar atau pendidikan penjenjangan.
 - 2) Memberikan ijin pegawai melanjutkan pendidikan lanjutan, atau kursus.
 - 3) Menyelenggarakan bimbingan teknis sesuai kebutuhan sekretariat dan bidang-bidang.
 - 4) Menyelenggarakan rapat teknis sesuai kebutuhan sekretariat dan bidang-bidang.
 - 5) Melaksanakan studi komparasi.
2. Pengembangan implementasi teknologi informasi dengan:
 - 1) Meremajakan perangkat keras.
 - 2) Mengadakan perangkat keras sesuai dengan kebutuhan.
 - 3) Menyempurnakan program/perangkat lunak/modul yang telah diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan.
 - 4) Membuat program/perangkat lunak/modul baru dan mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan.
 - 5) Mengembangkan penyajian data dan informasi berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur dengan:
 - 1) Mengevaluasi dan menyempurnakan SOP dan SPP yang telah dibuat.
 - 2) Menyusun SOP dan SPP untuk pekerjaan yang belum dibuatkan SOP.
 - 3) Menerapkan SOP dan SPP.
 - 4) Mengimplementasikan Standar ISO di Kantor Samsat secara bertahap.
 - 5) Melakukan *surveillance* pada Unit-Unit kerja yang telah ber-ISO.
 - 6) Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan sesuai ketentuan.
4. Peningkatan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik dengan:

- 1) Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai kebutuhan.
 - 2) Menyelenggarakan kegiatan yang memupuk kedisiplinan, inovasi, prestasi, dan hubungan harmonis antar personal.
 - 3) Meningkatkan pembinaan personal secara berkelanjutan.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dengan:
- 1) Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana.
 - 2) Merehabilitasi /merenovasi gedung kantor, rumah Badan UP3AD/Samsat yang sudah kurang sesuai dengan kebutuhan.
 - 3) Membangun gedung baru untuk Kantor UP3AD/Samsat yang sudah tidak memungkinkan untuk direhabilitasi guna memenuhi kebutuhan dan perkembangan.
 - 4) Mengadakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
 - 5) Memelihara sarana dan prasarana yang telah ada.
6. Intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan:
- 1) Melakukan pemetaan potensi pajak daerah.
 - 2) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pajak daerah.
 - 4) Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait .
7. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan:
- 1) Melakukan pemetaan potensi retribusi.
 - 2) Meningkatkan kepatuhan pembayar retribusi.
 - 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan retribusi daerah.
 - 4) Meningkatkan kerjasama dan Koordinasi dengan SKPD penghasil retribusi dan pendapatan lain-lain.
 - 5) Menyesuaikan tarif retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Menyempurnakan sistem pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

8. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dengan:
 - 1) Melakukan pendataan/inventarisasi aset daerah.
 - 2) Melakukan pengamanan aset daerah.
 - 3) Meningkatkan kerjasama dan Koordinasi dengan SKPD pengguna dan instansi terkait.
 - 4) Menyelesaikan permasalahan aset daerah.
 - 5) Menyempurnakan sistem pelaporan aset daerah.
 - 6) Meningkatkan peran UP3AD dalam pengelolaan aset daerah
9. Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah dengan:
 - 1) Melakukan administrasi pendataan/inventarisasi aset daerah.
 - 2) Melaksanakan penghapusan aset daerah.
 - 3) Melakukan perbaikan aset daerah yang dipandang perlu.
 - 4) Mempromosikan aset daerah melalui media cetak dan elektronik.
 - 5) Mempercepat proses administrasi dengan pihak ketiga.

Dari keseluruhan gambaran misi sampai dengan kebijakan yang ditetapkan pada Renstra DPPAD Propinsi Jawa Tengah diatas pada dasarnya keseluruhannya sesuai dan sinkron dengan Tupoksi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang; dan dapat di adopsi ke dalam Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.

Visi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2018 :

“Menjadi Institusi Terdepan Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat Secara Profesional Dan Akuntabel Guna Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari”.

Untuk mencapai Visi tersebut Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Kebijakan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2013-2018. Dari keseluruhan misi, tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan yang

ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berkaitan erat dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang adalah misi, tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan dari Biro Keuangan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Misi :

Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi, kehumasan, keuangan dan umum secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar *stakeholder*.

b. Tujuan :

Mewujudkan efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

c. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan dan pelaksanaan APBD yang efektif , efisien dan akuntabel
2. Meningkatnya tertib administrasi sistem pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel .
3. Meningkatnya tertib administrasi dan efektifitas sistem pengelolaan kas daerah.
4. Meningkatnya tertib dan efektifitas sistem pengelolaan akuntansi keuangan daerah.

d. Strategi :

1. Peningkatan kualitas kebijakan pelaksanaan APBD
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran
3. Pemanfaatan Teknologi informasi dalam pengelolaan kas daerah
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan akuntansi

e. Kebijakan :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBD
2. Menerapkan skala prioritas terhadap kebijakan penganggaran
3. Meningkatkan tertib dan keamanan pengelolaan kas daerah
4. Meningkatkan kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Telaahan terhadap Tata Ruang dalam Pengelolaan Aset Daerah	Arahan Pengembangan Tata Ruang belum menjadi salah satu dokumen yang menjadi acuan pembangunan pasar, penempatan ruang iklan dan pembangunan fasilitas umum yang merupakan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang sesuai dengan dokumen Tata Ruang Wilayah 2. Aparatur Perencana belum sepenuhnya memahami urgensi tata ruang dalam dokumen perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Perda RTRW 2. Berbagai regulasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan menempatkan telaah terhadap tata ruang sebagai salah satu aspek tinjauan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menjalankan kapasitas peran dan fungsinya yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan strategis, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Magelang perlu mengidentifikasi faktor internal yang menyangkut kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang menyangkut peluang dan ancaman, sehingga upaya mengatasinya dibutuhkan adanya Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan berbagai komponen, Instansi Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Berbagai kekuatan, kelemahan serta peluang dan ancaman dimaksud antara lain dapat diidentifikasi dan dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor Internal :

a. Kekuatan :

- 1). Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang satu-satunya komponen unit kerja SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- 2). Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai dasar pijak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang;
- 3). Tersedianya dukungan tenaga pejabat struktural serta pejabat fungsional umum yang dapat diberdayakan untuk merespon perubahan kondisi dan meningkatkan kompetensi dan kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang;
- 4). Tersedianya dukungan anggaran yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.

b. Kelemahan :

- 1). Masih rendahnya profesionalitas pejabat fungsional umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- 2). Terbatasnya kuantitas dan kualitas pejabat fungsional umum yang ditempatkan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang;
- 3). Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang (terutama perangkat teknologi informasi serta komunikasi) dalam penyelenggaraan kegiatan operasional Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang;
- 4). Lemahnya Koordinasi dan kerjasama internal/eksternal, serta belum didayagunakannya jejaring kerja dengan pusat dan provinsi.

2. Faktor Eksternal :

a. Peluang :

- 1). Adanya dukungan pimpinan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap eksistensi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dalam mendukung pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2). Adanya dorongan yang kuat dari SKPD dan lintas sektor yang lain;
- 3). Adanya tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4). Adanya tuntutan masyarakat dalam peningkatan pelayanan;
- 5). Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- 6). Diberlakukannya sistem anggaran berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Ancaman :

- 1). Sulitnya meningkatkan pendapatan daerah;
- 2). Adanya peraturan perundang baru yang berdampak pada turunnya PAD;
- 3). Terbatasnya jumlah DAU dan DAK dari pusat;
- 4). Masih melekatnya budaya *segan dan apatis* dalam penyampaian pendapat.

Dari uraian faktor-faktor eksternal dan internal yang disebutkan di atas, selanjutnya akan dirumuskan isu-isu strategis yang dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu *comparative advantages*, *mobilization*, *investment/divestment*, dan *status quo*. Adapun Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Interaksi antara peluang dan kekuatan (*comparative advantages*).
 - a. Mendorong pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah untuk meningkatkan kompetensi (profesionalitas) dengan menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara konsisten dalam meningkatkan eksistensi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Meningkatkan wawasan dan kepekaan pejabat Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk merespon tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. Mensinergikan kegiatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk memberikan dukungan kebijakan pimpinan guna memenuhi tuntutan reformasi;
 - d. Menegakkan dasar hukum penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mendukung perumusan kebijakan strategis;
 - e. Memanfaatkan dasar hukum penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk meningkatkan kompetensi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna memenuhi tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - f. Menjabarkan dasar hukum penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mendukung penerapan sistem anggaran berbasis kinerja secara konsisten.
2. Interaksi antara kekuatan dan ancaman (*mobilization*)
 - a. Memberdayakan pejabat struktural dan pejabat fungsional umum Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang untuk menghilangkan budaya dilayani menjadi melayani;

- b. Meningkatkan kualitas manajemen pejabat struktural (pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku) dan kualitas pejabat fungsional umum dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - c. Meningkatkan kerjasama dan Koordinasi dengan SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Magelang;
 - d. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dalam menjalankan tupoksinya sesuai dasar hukum penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah agar mendapat dukungan dari Pimpinan;
 - e. Memanfaatkan dasar hukum penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai dasar dalam melakukan Koordinasi seluruh kegiatan yang bersifat pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah .
3. Interaksi antara peluang dan kelemahan (*investment/divestment*)
- a. Merespon dan menjabarkan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif dan efisien;
 - b. Menyelenggarakan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebutuhan *stakeholders*;
 - c. Menyertakan pejabat Badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Magelang dalam setiap kegiatan perumusan kebijakan strategis dan pemenuhan kebutuhan fasilitas penunjang kegiatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang;
 - d. Melaksanakan sistem anggaran berbasis kinerja secara konsisten guna mewujudkan kompetensi yang berbasis pada Tupoksi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang;
 - e. Merumuskan dan melaksanakan anggaran prioritas terkait dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan kebutuhan bukan keinginan.

4. Interaksi antara kelemahan dan ancaman (*status quo*)
 - a. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang secara konsisten;
 - b. Mengupayakan pejabat struktural dan pejabat fungsional umum Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang untuk dapat memahami kompetensi sebagai Pejabat di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang;
 - c. Mengupayakan pejabat struktural dan pejabat fungsional umum Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang untuk melaksanakan Koordinasi secara kontinyu dan sungguh-sungguh dengan komponen lain sebagai mitra kerjanya.

Berikut ini isu-isu strategis 5 (lima) tahun mendatang yang berkaitan erat dengan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah :

1. Pengelolaan aset/barang daerah (terutama inventarisasi dan pengadministrasian) masih ditemukan kelemahan sehingga perlu dilakukan berbagai upaya mendorong optimalisasinya, baik di internal Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maupun di SKPD lainnya. Hal tersebut menjadi masalah krusial karena pengelolaan aset/barang daerah telah menjadi bagian audit substantif BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu perlu dukungan kebijakan melalui regulasi daerah dan komitmen bersama dari semua SKPD dilingkup Pemda Kabupaten Magelang.
2. Pemanfaatan kekayaan daerah belum optimal untuk meningkatkan PAD Kabupaten Magelang dan belum ada regulasi daerah sebagai dasar hukum pemanfaatan kekayaan daerah.
3. Pengelolaan pendapatan daerah masih ditemukan Wajib Pajak yang masih rendah kesadarannya untuk membayar pajak dan belum optimalnya pemungutan atas potensi pajak yang ada. Mendasari hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya secara terus-menerus peningkatan kesadaran Wajib Pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan didukung regulasi daerah

sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

4. Permasalahan penyelesaian Piutang PBB yang diserahkan dari Pusat ke Daerah.
5. Rendahnya PAD Kabupaten Magelang sehingga belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBD. Oleh karena itu perlu untuk menggali potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi dengan tetap tidak terlalu membebani masyarakat.
6. Belum terintegrasikannya aplikasi SIPKD, SIMBADA, MAPATDA, Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah, Sistem Informasi Penggajian dan SIMDA ke dalam satu sistem. Oleh karena itu, aplikasi semua sistem tersebut akan diintegrasikan melalui pengoptimalan semua fungsi serta *tools* yang ada pada aplikasi SIMDA melalui berbagai cara, baik dengan perpindahan/ migrasi pemanfaatan sistem ataupun kustomisasi aplikasi untuk mendorong tercapainya kesatuan aplikasi sistem tersebut guna memperoleh hasil integrasi sistem yang memadai

Isu-isu strategis tersebut dapat dinilai dengan menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :

Tabel 3.4

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra	20
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD	20
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
6.	Opini BPK atas LKPD Kabupaten Magelang	20

Penentuan kriteria serta bobot diatas berdasarkan pada beberapa pertimbangan yang mengarah pada keterkaitan antara isu strategis dengan kinerja SKPD yang berpengaruh bagi pembangunan daerah. Penjabarannya sebagai berikut :

- a. Kriteria ke-1 : Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian Renstra :

Apabila isu strategis yang diangkat memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra, maka isu strategis tersebut diberi bobot sebesar 20 (dua puluh). Pemberian bobot yang besar ini ditentukan karena Renstra merupakan sebuah pedoman pelaksanaan kerja Pemerintah Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahunan sehingga bisa dijadikan tolok ukur.

- b. Kriteria ke-2 :Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD :

Kriteria ini diambil karena faktor tugas dan tanggungjawab SKPD sangat erat kaitannya dengan isu-isu strategis pada sebuah SKPD. Berhasil atau gagalnya suatu isu strategis tergantung pada komitmen tanggungjawab bersama. Oleh karena itu pada pembobotannya apabila Isu strategis yang diangkat merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD, maka diberikan skor sebesar 20 (dua puluh).

- c. Kriteria ke-3 : Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik :

Tujuan akhir dari pelaksanaan pembangunan daerah adalah untuk kepentingan publik. Oleh karena itu apabila isu-isu strategis yang akan diangkat terhadap publik diambil dan diberikan bobot 20 (dua puluh). Pada penilaian ini dilihat, apakah isu-isu strategis yang diangkat memiliki dampak terhadap publik atau tidak. Apabila isu tersebut berdampak bagi publik, maka diberikan skor 20 (dua puluh). Sebagai contoh apabila isu tersebut tidak terlaksana, apakah ada dampak yang pada pembangunan di masyarakat.

- d. Kriteria ke-4 : Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah:

Kriteria ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh isu-isu strategis yang akan diangkat terhadap pembangunan daerah. Apakah keberhasilan isu-isu strategis tersebut memiliki daya ungkit untuk meningkatkan pembangunan daerah. Oleh karena itu pada kriteria ini diberikan bobot sebesar 10 (sepuluh).

- e. Kriteria 5 : Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani :
Kriteria ini ditentukan untuk menilai apakah isu-isu strategis yang akan diangkat tersebut memiliki kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani, atau justru merupakan isu yang sangat sulit untuk ditangani. Apabila mudah ditangani maka diberikan bobot sebesar 10 (sepuluh).
- f. Kriteria 6 : Opini BPK atas LKPD Kabupaten Magelang
Kriteria ini diambil dikarenakan adanya opini BPK atas LKPD Kabupaten Magelang. Apakah isu-isu strategis yang akan diangkat tersebut dapat mempengaruhi atau merubah Opini BPK atas LKPD Kabupaten Magelang dari WDP menjadi WTP.

Tabel 3.5
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Belum optimalnya pengelolaan asset daerah	20	20	20	10	10	20	100
2.	Belum optimalnya pemanfaatan kekayaan daerah untuk meningkatkan PAD karena kurang didukung regulasi tentang pemanfaatan kekayaan daerah	20	20	20	10	10	20	100
3.	Belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi karena rendahnya kesadaran WP	20	20	20	10	10		80
4.	Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD	20	20	20	10	10		80
5.	Belum bisa menerima Piutang PBB-P2 karena data dari KPP Pratama yang belum valid	20	20	20	10	10		80

6.	Masih belum terintegrasinya aplikasi SIKD, SIMBADA, MAPATDA, SPKD, SIP dan SIMDA ke dalam satu sistem	20	20		10	10		60
----	---	----	----	--	----	----	--	----

Semakin besar nilai bobot yang diperoleh dari penilaian kriteria-kriteria masing-masing isu strategis, maka isu strategis tersebut semakin perlu dikedepankan untuk ditangani. Dari hasil pembobotan diatas diketahui bahwa bobot tertinggi adalah isu strategis : Belum optimalnya pengelolaan asset daerah dan Belum optimalnya pemanfaatan kekayaan daerah untuk meningkatkan PAD karena kurang didukung regulasi tentang pemanfaatan kekayaan daerah. Isu strategis pertama yang mendapatkan bobot penilaian tertinggi sesuai dengan kenyataan bahwa pada Tahun 2014 telah dianggarkan dana untuk pengelolaan aset namun dalam pengelolaan hingga penelusuran dan pengelolaan aset daerah pada semua SKPD belum optimal hasilnya hal ini karena belum berkomitmennya semua pimpinan SKPD sehingga pelaksanaan inventarisasi aset di SKPD-SKPD khususnya di SKPD besar belum optimal, maka perlu komitmen bersama dari semua SKPD akan pentingnya pengelolaan Aset Daerah, rajin untuk mencatat semua nilai perolehan kekayaan yang dimiliki SKPD berupa barangoleh pengelola barang. Urutan kedua disusul kegiatan fasilitasi kerjasama dengan investor namun tidak teralisasi, hal ini disebabkan karena belum didukung oleh regulasi tentang pemanfaatan kekayaan daerah, sehingga pelaksana, dalam hal ini Bidang Aset belum dapat secara optimal untuk mewujudkan kegiatan tersebut. Pihak investor juga terkesan masih enggan untuk bekerjasama dikarenakan belum ada payung hukum yang jelas. Isu strategis kedua merupakan isu klasik yang sudah terjadi sejak lama dan perlu segera diatasi karena ini sangat berkaitan dengan Pendapatan Daerah yang seharusnya bisa diperoleh. Isu strategis yang ketiga yakni Belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi karena rendahnya kesadaran WP, Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD, serta Belum

selesainya permasalahan Piutang PBB-P2 dari pusat. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya penggalan potensi PAD.

Dari urutan isu-isu strategis yang memiliki bobot tertinggi tersebut, maka dapat diperoleh informasi bahwa isu strategis yang perlu segera ditangani melalui Renstra SKPD ini adalah terutama persoalan pengelolaan aset, diikuti upaya peningkatan PAD serta pengelolaan keuangan.

Sementara Tabel 3.6 berikut ini berusaha menjabarkan tentang hubungan isu-isu strategis dari lingkungan eksternal baik isu-isu strategis yang bersifat dinamika internasional, dinamika nasional maupun dinamika regional. Isu-isu strategis dari lingkungan eksternal ini penting untuk diidentifikasi karena sangat besar pengaruhnya terhadap upaya penyusunan Renstra.

Tabel 3.6
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	Terjalinnnya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan beberapa lembaga Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	<i>Good governance</i> dan <i>clean goverment</i> menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan.	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan negara-negara donor	Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	
4	Meningkatnya kerjasama antara negara	Partisipasi masyarakat menjadi isu yang sangat kuat dalam berbagai regulasi perencanaan di tingkat pusat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

Tujuan adalah apa yang akan dicapai/dihasilkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan tujuan dimaksud ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Bupati. Adapun tujuan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang untuk kurun waktu Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Meningkatnya PAD serta Pendapatan Daerah lainnya;
- d. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD yang akuntabel dan profesional;
- e. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD yang akuntabel dan profesional.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang untuk kurun waktu Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas, profesionalisme , wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan Tupoksi sesuai tuntutan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung administrasi kantor dan pelayanan umum;
- c. Optimalnya Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah terutama dari komponen Pendapatan Asli Daerah yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

- d. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan publik;
- e. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan aset dan terkelolanya Aset Daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Adapun Hubungan misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

No	Uraian	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			Kondisi Akhir (Tahun 2019)
			2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tujuan 1: Meningkatnya kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kualitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas, profesionalisme , Wawasan dan Keterampilan dalam Pelaksanaan Tupoksi sesuai tuntutan PeraturanPerundangan yang berlaku.	Indikator Sasaran 1 : Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek, diklat dan pelatihan lainnya.	12 org	10 org	10 org	10 org
		Indikator Sasaran 2 : Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi dan latar belakang di bidang system informasi	5 org	5 org	5 org	5 org

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Tujuan 2: Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	Persentase peningkatan kualitas pelayanan umum	100%	100%	100%	100%
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung administrasi kantor dan pelayanan umum.	Indikator Sasaran 1 : % peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien	95%	95%	95%	95%
3	Tujuan 3: Meningkatnya PAD serta Pendapatan Daerah lainnya	Persentase peningkatan PAD	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%
	Sasaran 1: Optimalnya Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah terutama dari 2 komponen PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Indikator Sasaran 1 : Persentase Peningkatan Porsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	4,50%	4,80%	5%	5%
		Indikator Sasaran 2 : Persentase Peningkatan PAD	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD yang Akuntabel dan Profesional.	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
	Sasaran 1: Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan publik	Indikator Sasaran 1 : Rancangan Perda dan Perda APBD selesai tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Indikator Sasaran 2 : Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Tujuan 5: Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD yang akuntabel dan profesional	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
	Sasaran 1: Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan aset dan terkelolanya Aset Daerah yang berorientasi pada kepentingan publik	Indikator Sasaran 1: Data Inventaris Aset sesuai dengan Neraca	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.2
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

NO	URAIAN	TARGET 2014 (Rp)	PROYEKSI (Rp)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	PENDAPATAN	1.607.249.536.735	1.705.110.557.521	2.012.744.279.469	2.063.607.671.504	2.269.577.451.314	2.481.154.764.218
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	192.413.765.051	210.305.224.087	247.099.437.198	266.724.315.226	306.918.928.377	339.103.619.413
4.1.1	Pajak Daerah	62.467.105.000	68.713.815.500	82.035.197.050	83.143.716.755	91.458.088.431	100.603.897.274
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	37.790.909.725	17.537.544.844	19.807.206.015	21.524.330.917	23.844.694.251	26.431.061.861
4.1.3	Hasil Perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.540.994.826	14.555.924.121	16.793.839.900	19.328.527.741	22.190.973.716	25.560.304.351
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	79.614.755.500	109.497.939.622	128.463.194.233	142.727.739.813	169.425.171.979	186.508.355.926
4.2	Bagian Dana Perimbangan	1.063.764.084.671	1.148.484.954.226	1.241.814.979.415	1.343.015.662.769	1.453.172.606.600	1.573.078.439.960
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	33.658.167.671	32.965.525.436	33.322.943.043	33.322.943.043	33.322.943.043	33.322.943.043
4.2.2	DAU	965.124.427.000	1.050.537.938.790	1.143.510.546.372	1.244.711.229.726	1.354.868.173.557	1.474.774.006.917
4.2.3	DAK	64.981.490.000	64.981.490.000	64.981.490.000	64.981.490.000	64.981.490.000	64.981.490.000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	351.071.687.013	346.320.379.208	523.829.862.856	453.867.693.509	509.485.916.337	568.972.704.845
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.965.400.000	2.034.520.043	1.230.105.800	-	-	-
4.3.2	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lain	83.578.495.013	97.786.839.165	114.410.601.823	133.860.404.133	156.616.672.836	183.241.507.218
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	226.290.121.000	226.290.121.000	337.896.025.000	299.798.390.376	332.660.344.501	365.522.298.627
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lain	39.237.671.000	20.208.899.000	20.208.899.000	20.208.899.000	20.208.899.000	20.208.899.000

Sumber : Bidang Perbendaharaan dan Pelaporan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang bulan Desember 2014

Tabel 4.3
 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Magelang
 Tahun 2014-2019

No	Uraian	Proyeksi					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	1.044.467.581.200	1.120.782.789.560	1.360.290.702.511	1.305.833.322.376	1.413.051.834.296	1.504.517.709.048
1	Belanja Pegawai	939.019.542.206	989.939.423.690	1.163.042.642.853	1.151.239.624.381	1.246.668.432.223	1.325.659.669.975
2	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	1.314.494.000	1.759.318.770	11.943.559.077	2.354.832.803	2.354.832.803	3.151.923.134
3	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota pemerintahan desa	89.133.544.994	119.084.047.100	170.304.500.581	137.238.865.192	149.028.569.270	160.706.115.939
4	Belanja tidak terduga	15.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	Dst...		-	-	-	-	-
B	Belanja langsung	97.606.926.967	130.616.376.160	-	193.277.558.404	238.885.466.150	297.855.994.588
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	4.826.064.310	7.493.335.452	-	18.065.056.129	28.049.258.534	43.551.533.896
2	Belanja beasiswa pendidikan PNS	792.400.000	1.085.189.588	-	2.035.297.603	2.787.334.387	3.817.246.662

No	Uraian	Proyeksi					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-	-	-
6	Belanja BLUD/JKN	74.490.878.650	98.423.044.860	-	130.164.476.826	149.998.731.312	172.142.520.603
	Dst...						
C	Pembiayaan pengeluaran	81.795.000.000	41.778.367.025	26.645.000.000	49.075.542.086	7.025.000.000	300.000.000
1	Pembentukan Dana Cadangan	72.000.000.000	31.000.000.000	16.000.000.000	40.723.542.086	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-		-	-	-
3	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	9.585.000.000	10.478.367.025	10.345.000.000	8.052.000.000	6.725.000.000	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	210.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	Dst...						
	TOTAL (A+B+C)	1.223.869.508.167	1.293.177.532.745	1.386.935.702.511	1.548.186.422.866	1.658.962.300.446	1.802.673.703.636

Sumber : Bidang Perbendaharaan dan Pelaporan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang bulan Desember 2014

Tabel 4.4
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Magelang

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Proyeksi (Rp)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	429.034.403.298	111.290.922.281	140.779.301.901	42.300.000.000	72.023.542.086	300.000.000
6.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	417.324.403.298	75.080.922.281	49.202.843.987	-	-	-
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Kembali Pemberian	11.500.000.000	36.000.000.000	91.276.457.914	42.000.000.000	71.723.542.086	-
6.1.5	Pinjaman	210.000.000	210.000.000	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000
6.1.7	Penerimaan Hasil Penarikan	-	-	-	-	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	81.795.000.000	41.778.367.025	26.645.000.000	49.075.542.086	7.025.000.000	300.000.000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	72.000.000.000	31.000.000.000	16.000.000.000	40.723.542.086	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	9.585.000.000	10.478.367.025	10.345.000.000	8.052.000.000	6.725.000.000	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	210.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	Pembiayaan Netto	347.239.403.298	69.512.555.256	114.134.301.901	(6.775.542.086)	64.998.542.086	-
6.3	SILPA Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Bidang Perbendaharaan dan Pelaporan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang bulan Desember 2014

Tabel 4.5

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

No	Uraian	Proyeksi					
		2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Pendapatan	1.607.249.536.735	1.705.110.557.521	1.884.477.959.487	2.063.607.671.505	2.269.577.451.314	2.481.154.764.218
2.	Pencairan dana cadangan	11.500.000.000	20.000.000.000	101.276.457.914	42.000.000.000	71.723.542.086	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	417.324.403.298	75.080.922.281	-	-	-	-
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	210.000.000	210.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	Total penerimaan	2.036.283.940.033	1.800.401.479.802	1.986.054.417.401	2.105.907.671.505	2.341.600.993.400	2.481.454.764.218
	Dikurangi :						
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.223.859.528.367	1.293.177.532.745	1.410.858.707.351	1.548.186.422.866	1.658.962.300.446	1.802.673.703.636
		812.424.411.666	507.223.947.057	575.195.710.051	557.721.248.639	682.638.692.955	678.781.060.582

Sumber : Bidang Perbendaharaan dan Pelaporan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang bulan Desember 2014

Tabel 4.6
 Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
 Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

No	Uraian	Proyeksi					
		2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
	Kapasitas Keuangan	2.036.283.940.033	1.800.401.479.802	1.986.054.417.401	2.105.907.671.505	2.341.600.993.400	2.481.454.764.218
1	Prioritas I (Wajib dan mengikat)	12.238.859.528.367	1.293.177.532.745	1.410.858.707.351	1.548.186.422.866	1.658.962.300.446	1.802.673.703.636
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	812.424.411.666	507.223.947.057	575.195.710.051	557.721.248.639	682.638.692.955	678.781.060.582
2	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	750.385.443.166	470.908.934.057	541.930.108.833	524.945.441.647	610.337.986.362	646.941.201.378
2.1	Belanja program prioritas dalam rangka mendukung visi misi KDH	388.463.573.654	170.356.409.510	247.761.185.077	186.529.216.011	194.400.817.101	142.731.900.646
2.2	Belanja program SPM	127.007.285.662	139.251.850.101	163.641.431.611	173.942.283.909	188.988.063.029	271.347.107.280
2.3	Belanja program prioritas pembangunan daerah	190.061.848.498	114.349.061.122	83.280.269.522	116.931.109.805	179.110.665.011	184.728.142.932
2.4	Belanja program prioritas pendukung lainnya	44.852.735.352	46.951.613.324	47.247.222.623	47.542.831.922	47.838.441.221	48.134.050.520
3.	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III	62.038.968.500	36.315.013.000	33.265.601.218	32.775.806.992	72.300.706.593	31.839.859.204
3.1	Hibah	49.452.098.500	25.518.818.000	24.912.959.618	24.508.806.110	64.116.777.207	23.736.509.170
3.2	Bansos	12.586.870.000	10.796.195.000	8.352.641.600	8.267.000.882	8.183.929.386	8.103.350.034
II	Surplus anggaran riil/berimbang	-	-	-	-	-	-

Sumber : Bidang Perbendaharaan dan Pelaporan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang bulan Desember 2014

Tabel 4.7
Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II, dan III Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2019

No.	Jenis Dana	Alokasi											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	Prioritas I	1.223.859.528.367	63,06	1.293.177.532.745	72,65	1.410.858.707.351	72,18	1.548.186.422.866	75,53	1.658.962.300.446	72,83	1.802.673.703.636	75,52
2.	Prioritas II	750.385.443.166	35,23	470.908.934.057	25,49	541.930.108.833	26,05	524.945.441.647	22,8	610.337.986.362	23,83	646.941.201.378	23,06
3.	Prioritas III	62.038.968.500	1,72	36.315.013.000	1,86	33.265.601.218	1,76	32.775.806.992	1,67	72.300.706.593	3,33	31.839.859.204	1,42
	Total	2.036.283.940.033	100	1.800.401.479.802	100	1.986.054.417.402	100	2.105.907.671.505	100	2.341.600.993.401	100	2.481.454.764.218	100

Sumber : Bidang Perbendaharaan dan Pelaporan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang bulan Desember 2014

Faktor –Faktor Kunci Keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan, tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan. Untuk mengukur pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan, setiap tahunnya dilakukan penilaian dan evaluasi. Dengan demikian dapat memudahkan dalam mengidentifikasi setiap langkah kegiatan yang dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan;

Dalam hubungan dengan kelancaran penyelenggaraan Tupoksi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, keberhasilan pencapaian kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor kunci keberhasilan, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. perda/perbub yang berkaitan dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang;
2. strategi dan komitmen pimpinan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang yang visioner;
3. rekrutmen SDM yang benar-benar konsen dan memiliki keilmuan bidang Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang;
4. penyusunan program dan kegiatan yang aplikatif;
5. sarana dan prasarana yang memadai;
6. monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan;
7. tersedianya dana yang memadai untuk menunjang tugas dan fungsi BPPKAD;
8. adanya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak di SKPD terkait dengan waktu pelayanan;
9. adanya peningkatan koordinasi intern diharapkan dapat mengatasi permasalahan di Bidang Pengelolaan Keuangan, Pajak Daerah dan Barang milik daerah;

4.2. Strategi Dan Kebijakan

1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Adapun strategi yang diterapkan

adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang untuk kurun waktu tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan amanah;
- b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan serta optimalisasi sarana prasarana;
- c. Mewujudkan peningkatan PAD serta Pendapatan Daerah lainnya melalui Sosialisasi regulasi, intensifikasi dan ekstensifikasi, optimalisasi pengawasan dan pengendalian internal, serta pengembangan sistem informasi pendapatan;
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
- e. Meningkatkan peran aktif setiap SKPD dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan;
- f. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah;
- g. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan publik;
- h. Meningkatkan peran aktif setiap SKPD dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan Barang Milik Daerah;
- i. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi Barang Milik Daerah;

2. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi, misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang adalah :

- a. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur;
- b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
- c. Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- d. Mewujudkan peningkatan PAD serta Pendapatan Daerah lainnya melalui Sosialisasi regulasi, intensifikasi dan ekstensifikasi, optimalisasi pengawasan dan pengendalian internal, serta pengembangan sistem informasi pendapatan;

- e. Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran dan akuntabel;
- f. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah untuk setiap SKPD;
- g. Pengembangan sistem informasi untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- h. Pengkajian rencana kebutuhan Barang Milik Daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tepat sasaran dan akuntabel;
- i. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi dan pelaporan Barang Milik Daerah untuk setiap SKPD;
- j. Pengembangan sistem informasi untuk transparansi pengelolaan Barang Milik Daerah;

Pada tabel 4.8 akan digambarkan hubungan strategi dan kebijakan SKPD, sebagai berikut:

Tabel 4.8

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD BPPKAD Kabupaten Magelang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1: Meningkatnya kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur	Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas, profesionalisme , Wawasan dan Keterampilan dalam Pelaksanaan Tupoksi sesuai tuntutan PeraturanPerundangan yang berlaku.	Strategi 1.1: Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan amanah	Kebijakan 1.1.1: Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
			Kebijakan 1.1.2: Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
Tujuan 2: Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	Sasaran 2.1: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung administrasi kantor dan pelayanan umum.	Strategi 2.1 Mewujudkan pemenuhan kebutuhan serta optimalisasi sarana prasarana;	Kebijakan 2.1: Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
Tujuan 3: Meningkatnya PAD serta Pendapatan Daerah lainnya	Sasaran 3.1: Optimalnya Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah terutama dari 2 komponen Pendapatan Asli Daerah yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Strategi 3.1 Mewujudkan peningkatan PAD serta Pendapatan Daerah lainnya melalui Sosialisasi regulasi,intensifikasi dan ekstensifikasi, optimalisasi pengawasan dan pengendalian internal, serta pengembangan sistem informasi pendapatan;	Kebijakan 3.1: Mewujudkan peningkatan PAD serta Pendapatan Daerah lainnya melalui Sosialisasi regulasi, intensifikasi dan ekstensifikasi, optimalisasi pengawasan dan pengendalian internal, serta pengembangan sistem informasi pendapatan;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 4: Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD yang Akuntabel dan Profesional.	Sasaran 4.1: Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan publik	Strategi 4.1: Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran	Kebijakan 4.1: Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran dan akuntabel
		Strategi 4.2: Meningkatkan peran aktif setiap SKPD dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan	Kebijakan 4.2: Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah untuk setiap SKPD
		Strategi 4.3: Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah	Kebijakan 4.3: Pengembangan sistem informasi untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 5: Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD yang akuntabel dan profesional	Sasaran 5.1: Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan aset dan terkelolanya Aset Daerah yang berorientasi pada kepentingan publik	Strategi 5.1: Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan publik;	Kebijakan 5.1 dan 5.2: Peningkatan sistem pengelolaan administrasi dan pelaporan Barang Milik Daerah untuk setiap SKPD
		Strategi 5.2: Meningkatkan peran aktif setiap SKPD dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan Barang Milik Daerah	
		Strategi 5.3: Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi Barang Milik Daerah;	Kebijakan 5.3: Pengembangan sistem informasi untuk transparansi pengelolaan Barang Milik Daerah

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada RPJMD 2014-2019, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 7 (tujuh) program, yaitu :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan pemerintah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan Kegiatan pokok

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelaporan keuangan yang dilaksanakan secara periodik dengan mengacu peraturan perundangan yang berlaku

D. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi penyusunan Renstra

E. Program Peningkatan dan pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah;

F. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Program ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

G. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah guna mendukung peningkatan Pendapatan Daerah

H. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah guna mendukung peningkatan Pendapatan Daerah

I. Program Perbaikan Sistem Administrasi dan Kearsipan

Program ini bertujuan untuk penataan dan pemetaan arsip dan dokumentasi keuangan.

Adapun klasifikasi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagaimana Tabel 5.1 berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran unit kerja SKPD yang bersangkutan, yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasikan. Dalam penerapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Dalam penetapan indikator kinerja daerah yang terdapat pada misi ke 5 (lima) RPJMD Kabupaten Magelang : “ Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Demokratis” tersebut ada 2 (dua) sasaran yang menjadi tugas dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang yang tercantum dalam tabel 6.1 dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama SKPD BPPKAD Kabupaten Magelang yang tercantum dalam tabel 6.2.

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi kinerja (Realisasi) Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah (DPPKAD & didukung seluruh SKPD)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Prosentase Peningkatan PAD	10,30%	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%

TABEL 6.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD BPPKAD

No.	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rancangan Perda dan Perda APBD selesai tepat waktu	Sebelum akhir tahun anggaran (sebelum 31 Desember tahun berkenaan).	100%	100%	100%	100%
2	Opini BPK "WTP" terhadap laporan keuangan daerah	Opini dari BPK RI, - Nilai 3 : untuk Opini WTP; - Nilai 2 : untuk Opini WDP; - Nilai 1 : untuk Opini Disclaimer	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Data inventaris aset sesuai dengan dengan neraca	$\frac{\text{Angka Neraca} - \text{Angka inventrs aset yg blm terdata}}{\text{Angka Neraca}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%
4	Persentase peningkatan PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD tahun } n - \text{Realisasi PAD tahun } n - 1}{\text{Realisasi PAD tahun } n - 1} \times 100\%$	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%
5	Persentase peningkatan porsi PAD terhadap pendapatan daerah	$\frac{\text{porsi PAD terhadap pendapatan daerah tahun } n - \text{porsi PAD terhadap pendapatan daerah tahun } n - 1}{\text{porsi PAD terhadap pendapatan daerah tahun } n - 1} \times 100\%$	4,50%	4,80%	5,00%	5,00%
6	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek, Diklat dan Pelatihan lainnya	∑ PNS yang mengikuti Bimtek, Diklat, Pelatihan di SKPD	12 org	10 org	10 org	10 org
7	Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi dan latar belakang pendidikan dibidang Teknologi Informatika	∑ PNS yang berkompetensi di bidang IT	5 org	5 org	5 org	5 org

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Prosentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien	$\frac{\sum \text{sarpras yg baik thn } n - \sum \text{sarpras yg baik thn } n - 1}{\sum \text{sarpras yang baik thn } n - 1} \times 100\%$	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini merupakan Penyesuaian RENSTRA Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang yang merupakan dokumen perencanaan dalam rangka mencapai visi, misi Kepala Daerah. Dokumen ini disusun sebagai konsekuensi logis ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Dokumen perubahan rencana strategis ini disusun berdasarkan identifikasi masalah, kemampuan, potensi, kekuatan dan peluang yang dimiliki Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang untuk meraih apa yang akan diinginkan dimasa yang akan datang. Dokumen ini selanjutnya diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan tiap tahunnya yang dituangkan ke dalam suatu Rencana Kerja. Dengan demikian Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan yang saling terkait yang disusun sebagai pedoman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja organisasi.

Demi keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu dukungan dari semua pihak serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Harapannya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan tugas, pokok dan fungsi, dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

KotaMungkid, Mei 2017

KEPALA BPPKAD
KABUPATEN MAGELANG

Drs. DJOKO TJAHOJONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 198403 1 018

**(PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN PERANGKAT DAERAH)**

PERUBAHAN RENSTRA SKPD

**BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

TAHUN 2014 - 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BPPKAD KABUPATEN MAGELANG
2017**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 merupakan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen ini disusun sebagai konsekuensi logis ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2014-2019 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang.

Penyusunan Perubahan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada BPPKAD baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sampai dengan tahun 2019 ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Perubahan Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Perubahan Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Magelang 2014-2019 yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGELANG YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MAJU DAN AMANAH“**.

Kota Mungkid, Mei 2017

KEPALA BPPKAD
KABUPATEN MAGELANG

Drs. DJOKO TJAHOJONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 198403 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang.....	I-1
	1.2 Landasan Hukum.....	I-3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
	1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BPPKAD	II-1
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPKAD.....	II-1
	2.2 Sumber Daya BPPKAD.....	II-20
	2.3 Kinerja Pelayanan BPPKAD.....	II-26
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPKAD.....	II-40
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III-1
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPKAD.....	III-1
	3.2 Telaahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-8
	3.3 Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Provinsi / Kabupaten/ Kota.....	III-12
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-19
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-19
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DAN KEBIJAKAN	IV-1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPKAD	IV-1
	4.2 Strategi dan Kebijakan BPPKAD.....	IV-13
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	V-1
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DPPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN MAGELANG	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

1	Tabel 2.1	SDM BPPKAD Kabupaten Magelang Berdasarkan Kelompok Jabatan.....	II-22
2	Tabel 2.2	Jenjang Pendidikan SDM Pada BPPKAD Kabupaten Magelang.....	II-23
3	Tabel 2.3	SDM Pada DPPKAD Kabupaten Magelang Menurut Golongan.....	II-23
4	Tabel 2.4	SDM Pada BPPKAD Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin.....	II-24
5	Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.....	II-25
6	Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BPPKAD Kabupaten Magelang.....	II-28
7	Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPKAD Kabupaten Magelang.....	II-31
8	Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah(SKPD) Kabupaten Magelang	II-33
9	Tabel 2.9	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011-2016.....	II-35
10	Tabel 2.10	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011-2011.....	II-36
11	Tabel 2.11	Kontribusi PAD Pada Pendapatan Daerah Tahun 2011-2016.....	II-36
12	Tabel 2.12	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.....	II-37
13	Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Magelang.....	III-4
14	Tabel 3.2	Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi, Dan Program Kerja Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	III-11
15	Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Keberhasilan Penanganannya Penghambat dan Pendorong.....	III-19
16	Tabel 3.4	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-25
17	Tabel 3.5	Nilai Skala Kriteria.....	III-27
18	Tabel 3.6	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)..	III-30
19	Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang	IV-3
20	Tabel 4.2	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.....	IV-6
21	Tabel 4.3	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.....	IV-7
22	Tabel 4.4	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Magelang.....	IV-9
23	Tabel 4.5	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah.....	IV-10

24	Tabel 4.6	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.....	IV-11
25	Tabel 4.7	Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I,II,dan III Kabupaten Magelang.....	IV-12
26	Tabel 4.8	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD BPPKAD Kabupaten Magelang.....	IV-16
27	Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD Mengacu Tujuan Dan Sasaran RPJMD.....	VI-2
28	Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama SKPD BPPKAD.....	VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.....	II-1
--	------

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 merupakan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen ini disusun sebagai konsekuensi logis ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2014-2019 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang.

Penyusunan Perubahan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada BPPKAD baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sampai dengan tahun 2019 ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Perubahan Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Perubahan Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Magelang 2014-2019 yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGELANG YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MAJU DAN AMANAH”**.

Kota Mungkid, Mei 2017

KEPALA BPPKAD
KABUPATEN MAGELANG

Drs. DJOKO TJAHOJONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 198403 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
	1.1 Latar Belakang.....	I-1
	1.2 Landasan Hukum.....	I-3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
	1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BPPKAD	II-1
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPKAD.....	II-1
	2.2 Sumber Daya BPPKAD.....	II-20
	2.3 Kinerja Pelayanan BPPKAD.....	II-26
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPKAD.....	II-40
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	III-1
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPKAD.....	III-1
	3.2 Telaahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-8
	3.3 Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Provinsi / Kabupaten/ Kota.....	III-12
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-19
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-19
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DAN KEBIJAKAN	IV-1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPKAD	IV-1
	4.2 Strategi dan Kebijakan BPPKAD.....	IV-13
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	V-1
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DPPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN MAGELANG.....	VI-1
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1

DAFTAR TABEL

1	Tabel 2.1	SDM BPPKAD Kabupaten Magelang Berdasarkan Kelompok Jabatan.....	II-22
2	Tabel 2.2	Jenjang Pendidikan SDM Pada BPPKAD Kabupaten Magelang.....	II-23
3	Tabel 2.3	SDM Pada DPPKAD Kabupaten Magelang Menurut Golongan.....	II-23
4	Tabel 2.4	SDM Pada BPPKAD Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin.....	II-24
5	Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.....	II-25
6	Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BPPKAD Kabupaten Magelang.....	II-28
7	Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPKAD Kabupaten Magelang.....	II-31
8	Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah(SKPD) Kabupaten Magelang	II-33
9	Tabel 2.9	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011-2016.....	II-35
10	Tabel 2.10	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011-2011.....	II-36
11	Tabel 2.11	Kontribusi PAD Pada Pendapatan Daerah Tahun 2011-2016.....	II-36
12	Tabel 2.12	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.....	II-37
13	Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Magelang.....	III-4
14	Tabel 3.2	Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi, Dan Program Kerja Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	III-11
15	Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Keberhasilan Penanganannya Penghambat dan Pendorong.....	III-19
16	Tabel 3.4	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-25
17	Tabel 3.5	Nilai Skala Kriteria.....	III-27
18	Tabel 3.6	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)..	III-30
19	Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang	IV-3
20	Tabel 4.2	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.....	IV-6
21	Tabel 4.3	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.....	IV-7
22	Tabel 4.4	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Magelang.....	IV-9
23	Tabel 4.5	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	IV-10

		Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah.....	
24	Tabel 4.6	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.....	IV-11
25	Tabel 4.7	Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I,II,dan III Kabupaten Magelang.....	IV-12
26	Tabel 4.8	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD BPPKAD Kabupaten Magelang.....	IV-16
27	Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD Mengacu Tujuan Dan Sasaran RPJMD.....	VI-2
28	Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama SKPD BPPKAD.....	VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.....	II-1
--	------

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 merupakan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen ini disusun sebagai konsekuensi logis ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2014-2019 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang.

Penyusunan Perubahan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada BPPKAD baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sampai dengan tahun 2019 ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Perubahan Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Perubahan Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Magelang 2014-2019 yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGELANG YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MAJU DAN AMANAH“**.

Kota Mungkid, Mei 2017

KEPALA BPPKAD
KABUPATEN MAGELANG



Drs. DJOKO TJAHJONO, MM
Kepala Utama Muda
NIP. 19641110 198403 1 018

BAB VII PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini merupakan Penyesuaian RENSTRA Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang yang merupakan dokumen perencanaan dalam rangka mencapai visi, misi Kepala Daerah. Dokumen ini disusun sebagai konsekuensi logis ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Dokumen perubahan rencana strategis ini disusun berdasarkan identifikasi masalah, kemampuan, potensi, kekuatan dan peluang yang dimiliki Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang untuk meraih apa yang akan diinginkan dimasa yang akan datang. Dokumen ini selanjutnya diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan tiap tahunnya yang dituangkan ke dalam suatu Rencana Kerja. Dengan demikian Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan yang saling terkait yang disusun sebagai pedoman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja organisasi.

Demi keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu dukungan dari semua pihak serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Harapannya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan tugas, pokok dan fungsi, dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

KotaMungkid, Mei 2017

KEPALA BPPKAD
KABUPATEN MAGELANG



Drs. DJOKO TJAHJONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 198403 1 018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 Mei 2017

KEPALA BPPKAD
KABUPATEN MAGELANG



Drs. DJOKO TIAHJONO, M.M
Bendahara Utama Muda
NIP. 19601110 198403 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
**BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid 56511 Telp.(0293) 788189

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 180.186/ /KEP/23/2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014-2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, Rancangan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 dan telah disahkan oleh Bupati dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45 / 524 / KEP /12/ 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah yang baru, maka Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membuat rancangan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembarah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembarah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 32);
9. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/163/KEP/24/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Nomor 188.4/109/KEP/31/2014 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal Mei 2017

KEPALA BPPKAD
KABUPATEN MAGELANG

Drs. DJOKO TJAHOJONO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19601110 198403 1 018

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan
Indikator SKPD BPPKAD Kabupaten Magelang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan(out put)	Data Target Kinerja sampai dengan tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				260.930.000,00		277.023.000,00		294.725.000,00		up	BPPKAD	KAB MAGELANG
			2.12	Penanaman Modal				160.930.000,00		177.023.000,00		194.725.000,00		up		
Meningkatkan PAD serta Pendapatan Daerah lainnya	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah terutama dari 2 komponen Pendapatan Asli Daerah yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Persentase Peningkatan PAD	2.12.4.4.5.1.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional	0		160.930.000,00		177.023.000,00		194.725.000,00	0	up		
			2.12.4.4.5.1.15.15	Fasilitasi dan Kerjasama Investasi	Jumlah analisa kajian investasi dan rancangan perjanjian kerjasama dengan investor	15 dokumen kajian (3 kajian teknis, 3 pelelangan, 3 taksiran kontribusi, 3 penilaian aset dan study kelayakan)	5 dokumen kajian (1 kajian teknis, 1 pelelangan, 1 taksiran kontribusi, 1 penilaian aset dan study kelayakan)	160.930.000,00	1 dokumen	177.023.000,00	5 dokumen kajian (1 kajian teknis, 1 pelelangan, 1 taksiran kontribusi, 1 penilaian aset dan study kelayakan)	194.725.000,00	0	up		
			2.18	Kearsipan			-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00		up		
Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung administrasi kantor dan pelayanan umum.	% peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien	2.18.4.4.5.1.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah unit pengelola yang menerapkan sistem administrasi kearsipan	WDP		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	0	up		
			2.18.4.4.5.1.15.8	Penataan dan Pemetaan Dokumen / Arsip	Jumlah sistem administrasi kearsipan keuangan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	0	up		
			4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang												
			4,4	Keuangan				17.421.027.260,00		24.395.246.480,00		27.179.401.740,00		157.773.123.870,00		
			4.4.4.4.5.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	771.980.000,00	WTP	849.178.000,00	WTP	934.095.800,00	WTP	4.502.132.500,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan(out put)	Data Target Kinerja sampai dengan tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4.4.4.4.5.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses	12.516 surat masuk ; 9.899 surat keluar	5000 surat masuk dan 3000 surat keluar	58.080.000,00	8000: 5000 surat masuk dan 3000 surat keluar	63.888.000,00	5000 surat masuk dan 3000 surat keluar	70.276.800,00	25.000 surat masuk dan 15.000 surat keluar	35.743.500,00		
			4.4.4.4.5.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan biaya bulanan	2 rekening telepon, 8 rekening listrik, 3 rekening air, 4 surat kabar	1 rekening telepon, 3 rekening listrik, 1 rekening air, dan 2 surat kabar	96.800.000,00	12 bulan	106.480.000,00	1 rekening telepon, 3 rekening listrik, 1 rekening air, dan 2 surat kabar	117.128.000,00	5 rekening telepon, 15 rekening listrik, 5 rekening air, dan 10 surat kabar	670.408.000,00		
			4.4.4.4.5.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolaan anggaran kegiatan	64 kegiatan, 8 program	61 kegiatan	199.650.000,00	68 kegiatan	219.615.000,00	68 kegiatan	241.576.500,00	68 kegiatan	1.125.841.500,00		
			4.4.4.4.5.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	268 koordinasi dan konsultasi	108 kali koordinasi dan konsultasi	235.950.000,00	108 koordinasi dan konsultasi	259.545.000,00	108 kali koordinasi dan konsultasi	285.499.500,00	540 koordinasi dan konsultasi	1.599.290.500,00		
			4.4.4.4.5.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan penerimaan tamu	268 koordinasi dan konsultasi, 248 rapat penerimaan tamu	48 kali rapat dan 24 kali penerimaan tamu	157.300.000,00	72 : 48 rapat dan 24 terima tamu	173.030.000,00	48 kali rapat dan 24 kali penerimaan tamu	190.333.000,00	144 rapat dan 72 terima tamu	926.806.000,00		
			4.4.4.4.5.1.1	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran	Honor Tenaga Kontrak, 12 bulan	1 pegawai	1 pegawai	24.200.000,00	100%	26.620.000,00	1 pegawai	29.282.000,00	5 pegawai	144.043.000,00		
			4.4.4.4.5.1.1	Penyedia Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian	-	100%	up	100%	up	100%	up	100%	up		
			4.4.4.4.5.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	2.908.250.000,00	WTP	3.164.575.000,00	WTP	3.499.033.000,00	WTP	38.728.287.100,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan(out put)	Data Target Kinerja sampai dengan tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4.4.4.4.5.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembelian kendaraan dinas operasional	147 unit kendaraan dinas roda 2, 25 unit kendaraan dinas/operasional atau lebih, 2 bus karyawan	50 unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan dinas/operasional roda 4 atau lebih	605.000.000	156: 3 unit R6,2 unit R4, 150 unit R2, 1 unit Bus Karyawan	665.500.000	10 unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan dinas/operasional roda 4 atau lebih	732.050.000,00	217 kendrn R2 dan 8 kendaraan R4	16.304.500.000,00		
			4.4.4.4.5.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pembelian perlengkapan gedung kantor	1 set meja tamu, 30 kursi rapat, 2 lemari kaca, 1 papan pengumuman, 2 kotak saran, 3 gerobag dorong, 2 dispenser, 1 brankas, 1 rak server	Rak buku, filling cabinet, almari arsip	145.200.000,00	20 unit rak arsip, 2 unit roll O pack, 4 unit filling kabinet, 3 unit meja eselon 3, 4 unit meja kerja eselon, 32 unit meja kerja staf, 7 unit kursi eselon, 32 unit kursi staf, 32 unit meja komputer, 6 unit kotak P3K, 1 paket karpet, 60 m gordyn	159.720.000,00	Rak buku, filling cabinet, almari arsip	175.692.000,00	20 unit rak arsip, 2 unit roll O pack, 4 unit filling kabinet, 3 unit meja eselon 3, 4 unit meja kerja eselon, 32 unit meja kerja staf, 7 unit kursi eselon, 32 unit kursi staf, 32 unit meja komputer, 6 unit kotak P3K, 1 paket karpet, 60 m gordyn	671.641.000,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan(out put)	Data Target Kinerja sampai dengan tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
			4.4.4.4.5.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pembelian peralatan gedung kantor	14 AC, 1 mesin penghancur kertas, 10 notebook, 18 printer, 16 AIO/PC, 1 server, 2 mesin hitung uang, 11 UPS client, 2 UPS server, 4 wireless, 6 LCD, 2 barrier gate, 9 eksternal HD, 3 LCD proyektor, 1 scanner, 2 TV, 2 pesawat telepon, 1 mesin fax, 16 CCTV, 1 parabola, 2 wifi router, 2 genset, 1 otomatis genset, 3 speaker, 4 paket instalasi	1 AC, 1 mesin penghancur kertas, 5 notebook, 5 printer	696.000.000,00	1 unit Genset, 27 unit tapping box, 4 unit AC 2 PK, 2 unit laptop, 2 unit thermal printer, 2 unit laser printer, 10 unit UPS, 1 paket back up data, 2 unit mesin portal, 10 unit lengan portal	708.600.000,00	1 AC, 1 mesin penghancur kertas, 5 notebook, 5 printer	848.460.000,00	14 AC, 1 mesin penghancur kertas, 10 notebook, 18 printer, 16 AIO/PC, 1 server, 2 mesin hitung uang, 11 UPS client, 2 UPS server, 4 wireless, 6 LCD, 2 barrier gate, 9 eksternal HD, 3 LCD proyektor, 1 scanner, 2 TV, 2 pesawat telepon, 1 mesin fax, 16 CCTV, 1 parabola, 2 wifi router, 2 genset, 1 otomatis genset, 3 speaker, 4 paket instalasi	3.818.580.000,00		
			4.4.4.4.5.1.2.10	Pengadaan Mebeulair	Jumlah pembelian mebeulair kantor	7 filling kabinet, 6 almari kaca, 2 almari katalok, 1 set meja kursi, 12 meja rapat, 16 meja komputer, 4 set meja kursi, 1 kursi eselon, 2 meja kursi kasir, 90 meter gordyn	Meja kerja eselon 2, Meja kursi kerja, Meja Kursi rapat	-	Meja kursi kerja eselon 2 dan 3	60.000.000,00	Meja kursi up	Meja kursi untul lobby, meja kerja eselon 2, meja kursi kerja, meja kursi rapat	219.817.000,00			
			4.4.4.4.5.1.2.11	Pengadaan Tanah	Jumlah pembelian tanah untuk gedung perkantoran	1 Bidang	bidang	up	bidang	up	bidang	up	bidang	up		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan(out put)	Data Target Kinerja sampai dengan tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Pengadaan Tanah untuk gedung pemungut pajak mineral bukan logam dan batuan	Jumlah luas tanah yang terbeli	1 bidang	1 bidang	up	bidang	up	bidang	up	bidang	9.785.523.000,00		
			4.4.4.4.5.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 gedung DPPKAD dan 6 pos pemungutan pajak	2 gedung dan 6 pos	181.500.000,00	2 gedung DPPKAD dan pos pemungutan pajak	199.650.000,00	2 gedung dan 6 pos	219.615.000,00	12 gedung, 16 pos	966.197.600,00		
			4.4.4.4.5.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	68 kendaraan dinas roda 4; 198 kendaraan dinas roda 2	13 kendaraan dinas roda 4 dan 43 kendaraan roda 2	726.000.000,00	63: Roda 2 : 50 unit dan roda 4 : 13 unit	798.600.000,00	13 kendaraan dinas roda 4 dan 43 kendaraan roda 2	878.460.000,00	78 kendaraan R4 dan 258 kendaraan R2	4.299.130.000,00		
			4.4.4.4.5.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Meja Kursi Tamu, Meja Kursi kerja, Almari Arsip, Meja Kursi kasir pos pare, Meja kursi komputer	Pemeliharaan Meja kursi tamu, Meja kursi kerja, Almari arsip	25.000.000,00	Pemeliharaan Meja Kursi Tamu, Meja Kursi kerja, Almari Arsip, Meja Kursi kasir pos pare, Meja kursi komputer	25.000.000,00	Pemeliharaan Meja kursi tamu, Meja kursi kerja, Almari arsip	25.000.000,00	Pemeliharaan Meja Kursi Tamu, Meja Kursi kerja, Almari Arsip, Meja Kursi kasir pos pare, Meja kursi komputer	100.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan(out put)	Data Target Kinerja sampai dengan tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
							8	9	10	11	12	13	14	15			
			4.4.4.4.5.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	TV, Kamera, AC, Mesin Ketik, Komputer PC Ringan, Komputer PC Berat, Server, Laptop, Printer Laserjet, PrinterDeskjet, Printer LQ2180, Printer OKI, UPS Server, LCD Proyektor, Space Iklan/ Papan Reklame, Komputer dan aplikasi	Pemeliharaan an AC, mesin ketik, komputer, PC, server, laptop, printer	429.550.000,00	TV, Kamera, AC, Mesin Ketik, Komputer PC Ringan, Komputer PC Berat, Server, Laptop, Printer Laserjet, PrinterDeskjet, Printer LQ2180, Printer OKI, UPS Server, LCD Proyektor, Space Iklan/ Papan Reklame, Komputer dan aplikasi	447.505.000,00	TV, Kamera, AC, Mesin Ketik, Komputer PC Ringan, Komputer PC Berat, Server, Laptop, Printer Laserjet, Printer Deskjet, Printer LQ2180, Printer OKI, UPS Server, LCD Proyektor, Space Iklan/ Papan Reklame, Komputer dan aplikasi	519.756.000,00	TV, Kamera, AC, Mesin Ketik, Komputer PC Ringan, Komputer PC Berat, Server, Laptop, Printer Laserjet, PrinterDeskjet, Printer LQ2180, Printer OKI, UPS Server, LCD Proyektor, Space Iklan/ Papan Reklame, Komputer dan aplikasi	2.212.898.500,00			
			4.4.4.4.5.1.2.46	Penataan Kantor	Jumlah penataan gedung kantor	0	1 gedung	100.000.000,00	1 gedung	100.000.000,00	1 gedung	100.000.000,00	3 gedung	300.000.000,00			
				Pembangunan gedung gudang aset	Terbangunnya gedung gudang aset	2 gedung (1 gudang aset, 1 mushola dan kamar mandi)		up			up		up				
				Penyusunan DED gedung gudang aset	Jumlah dokumen DED gedung gudang aset	2 dokumen DED		up			up		up	2 dokumen DED	50.000.000,00		
				Penyusunan FS gedung gudang aset	jumlah dokumen FS gedung gudang Aset	2 dokumen FS								2 dokumen FS	up		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan(out put)	Data Target Kinerja sampai dengan tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban KeuanganSKPD yang Akuntabel dan Profesional.	Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan publik	Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah	4.4.4.4.5.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	112.600.000,00	WTP	159.860.000,00	WTP	167.846.000,00	WTP	608.306.000,00		
			4.4.4.4.5.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Kinerja OPD	1 Dokumen (Renja, KUA PPAS, LPP APBD, Perjanjian kinerja, LPPK APBD, LPPD, LKPJ, LKJIP, LHP serta laporanrutin lainnya)	1 dokumen	24.200.000,00	1 Dokumen (Renja, KUA PPAS, LPP APBD, Perjanjian kinerja, LPPK APBD, LPPD, LKPJ, LKJIP, LHP serta laporanrutin lainnya)	26.620.000,00	1 dokumen	29.282.000,00	1 Dokumen (Renja, KUA PPAS, LPP APBD, Perjanjian kinerja, LPPK APBD, LPPD, LKPJ, LKJIP, LHP serta laporanrutin lainnya)	138.102.000,00		
			4.4.4.4.5.1.6.9	Penyusunan Profil Keuangan	Jumlah dokumen keuangan daerah	1 dokumen keuangan SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen keuangan daerah	20.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	4 dokumen keuangan daerah	75.000.000,00		
			4.4.4.4.5.1.6.10	Penyusunan Bank Data	Jumlah integrasi data berbasis aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	10.000.000,00	1 aplikasi	50.000.000,00	1 aplikasi	50.000.000,00	1 aplikasi	125.000.000,00		
			4.4.4.4.5.1.6.11	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring kegiatan-kegiatan pada BPPKAD	64 kegiatan, 8 program	61 kegiatan	10.000.000,00	68 kegiatan	10.000.000,00	68 kegiatan	10.000.000,00	68 kegiatan, 100%	40.000.000,00		
			4.4.4.4.5.1.6.12	Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)	Jumlah SOP	1 dokumen SOP pada BPPKAD (1Sekretariat, 6Bidang)	1 dokumen SOP pada BPPKAD (1Sekretariat, 6Bidang)	48.400.000,00	1 dokumen SOP pada BPPKAD (1Sekretariat, 6Bidang)	53.240.000,00	1 dokumen SOP pada BPPKAD (1Sekretariat, 6Bidang)	58.564.000,00	5 dokumen SOP pada BPPKAD (1Sekretariat, 6Bidang)	230.204.000,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan(out put)	Data Target Kinerja sampai dengan tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tujuan 4: Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban KeuanganSKPD yang Akuntabel dan Profesional.	Sasaran 1: Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan publik	Indikator Sasaran 2 : Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusun RENSTRA, RENJA,RPTK	1 Dokumen Renstra, 3 Dokumen Renja	1 dokumen evaluasi renstra	7.000.000,00	0	-	1 Dokumen Renstra, 3 Dokumen Renja	10.000.000,00	2 Dokumen Renstra, 15 Dokumen Renja	34.500.000,00		
				Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra DPPKAD Tahun 2014-2015	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	27.500.000,00			
				Evaluasi Renstra SKPD 2014-2019	Cakupan penyusunan renstra SKPD 2014-2019	1 dokumen	1 dokumen	7.000.000,00	0	-	0	-	1 dokumen	7.000.000,00		
Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban KeuanganSKPD yang Akuntabel dan Profesional.	Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan publik	Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah	4.4.4.4.5.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah dan Prosentase Peningkatan PAD	WDP ; 10,30%	WTP, 12,02%	13.621.197.260,00	WTP, 12,02%	20.221.633.480,00	WTP, 12,02%	22.568.426.940,00	WTP, 12,02%	113.899.898.270,00		
			4.4.4.4.5.1.17.1	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah Buku AnalisaStandar Belanja (ASB)	55 SKPD	50 OPD	up	50 OPD	200.000.000,00	50 OPD	200.000.000,00	50 OPD	7.992.635.000,00		
		Rancangan Perda dan Perda APBD selesai tepat waktu	4.4.4.4.5.1.17.6	Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang APBD	Jumlah Raperda danRaperbup tentang APBD	2 Perda dan 2 Perbup, 1 Perkada dan 720 buku	1 Raperda, 1 Raperbup dan 360 buku	778.111.000,00	1 Perda dan 1 Perbup	1.100.000.000,00	1 Raperda, 1 Raperbup dan 360 buku	2.000.000.000,00	6 Perda dan 6 Perbup, 1 Perkada	5.570.179.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.8	Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang Perubahan APBD	Jumlah Raperda dan Raperbup tentang Perubahan APBD	2 Perda, 2 Perbup dan 720 buku	1 Raperda, 1 Raperbup Perubahan dan 360 buku	283.310.000,00	1 Perda dan 1 Perbup	450.000.000,00	1 Raperda, 1 Raperbup Perubaha n dan 360 buku	500.000.000,00	6 Perda dan 6 Perbup	1.829.750.000,00		
		Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah	4.4.4.4.5.1.17.12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah penyusunan E-Budgeting	0	1 Paket	up	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	up	1 Paket	200.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan(out put)	Data Target Kinerja sampai dengan tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4.4.4.4.5.1.17.16	Peningkatan Managemen Aset /Barang Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan manajemen aset barang/ barang daerah	53 SKPD	48 OPD	380.089.100,00	48 OPD	530.000.000,00	48 OPD	530.000.000,00	48 OPD	2.259.021.100,00		
		Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah	4.4.4.4.5.1.17.20	Penilaian RKA-SKPD	Jumlah Penilaian RKA OPD RAPBD Tahun 2018, Perubahan RAPBD Tahun2017 dan Perkada Tahun2018	55 SKPD	55 SKPD	248.397.990,00	50 OPD	360.000.000,00	50 OPD	355.000.000,00	50 OPD	1.498.236.990,00		
			4.4.4.4.5.1.17.21	Penelitian DPA / DPPA -SKPD	Jumlah Penelitian DPA OPD APBD, Perubahan dan Perkada	55 SKPD	55 SKPD	325.807.000,00	50 OPD	480.000.000,00	55 SKPD	480.000.000,00	50 OPD	2.001.069.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.22	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pedoman penyusunan APBD	3 kali	1 kali	24.790.000,00	1 kali	50.000.000,00	1 kali	24.790.000,00	6 kali	150.150.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.23	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	258 orang	118 orang	568.962.000,00	118 orang	800.000.000,00	118 orang	1.150.000.000,00	612 orang	4.045.872.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.25	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD Berdasarkan SAP	Jumlah Peserta PembinaanPengelolaan Keuangan	55 SKPD	49 OPD dan 1 PPKD	97.000.000,00	49 OPD dan 1 PPKD	120.000.000,00	49 OPD dan 1 PPKD	120.000.000,00	49 OPD dan 1 PPKD	695.400.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.26	Pengumpulan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Pelaksanaan SAKD	Jumlah Laporan APBD dan data data neraca	55 SKPD	49 OPD dan 1 PPKD	220.000.000,00	49 OPD dan 1 PPKD	250.000.000,00	49 OPD dan 1 PPKD	250.000.000,00	49 OPD dan 1 PPKD	1.375.000.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.27	Penyusunan Buku LPP APBD	Jumlah Perda LPP APBD, LRA APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan CALK	3 Perda dan 3 Perbup	2: 1 Perda dan1 Perbup	310.000.000,00	2: 1 Perda dan1 Perbup	350.000.000,00	2: 1 Perda dan1 Perbup	350.000.000,00	6 Perda dan 6 Perbup	1.848.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan(out put)	Data Target Kinerja sampai dengan tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4.4.4.4.5.1.17.28	Pengelolaan Gaji dan Penerbitan SKPP	Jumlah SP2D dan SKPP (administrasi gaji)	2.758 SP2D; 2.398 SKPP	1000 SP2D dan 700 SKPP	106.241.000,00	1600: 1000SP2D dan 600SKPP	160.000.000,00	1000 SP2D dan 700 SKPP	160.000.000,00	6000 SP2D dan 3.600 SKPP	655.146.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.31	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah pencairan dana tepat waktu	55 SKPD dan PPKD	49 OPD dan 1 PPKD	450.000.000,00	49 OPD dan 1 PPKD	900.000.000,00	49 OPD dan 1 PPKD	900.000.000,00	49 OPD dan 1 PPKD	3.474.000.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.32	Penerbitan SPD dan SK Specimen	Jumlah Manajemen Kas dan SK Pengelolaan Keuangan	660 SPD dan 45 SK Specimen	235 : 220 SPD dan 15 SK Specimen	48.116.010,00	235 : 220 SPD dan 15 SK Specimen	79.000.000,00	235 : 220 SPD dan 15 SK Specimen	89.000.000,00	1.320 SPD dan 90 SK Specimen	316.231.710,00		
			4.4.4.4.5.1.17.33	Penyusunan laporan keuangan TP/UB	Jumlah laporan TP/UB	7 laporan	3 laporan	34.000.000,00	3 Laporan	55.000.000,00	3 Laporan	40.000.000,00	18 Laporan	201.000.000,00		
Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD yang akuntabel dan profesional	Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan aset dan terkelolanya Aset Daerah yang berorientasi pada kepentingan publik	Data Inventaris Aset sesuai dengan Neraca	4.4.4.4.5.1.17.34	Persertifikatan Tanah Milik Pemda	Jumlah sertifikat tanah milik Pemda	30 sertifikat	10 sertifikat	92.076.000,00	50 Sertifikat	200.000.000,00	50 Sertifikat	200.000.000,00	140 Sertifikat	732.688.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.35	Pembuatan papan nama tanah milik Pemda	Jumlah Papan nama Tanah milik Pemkab Magelang	150 papan nama	50 papan nama	84.993.000,00	50 papan nama	135.000.000,00	50 papan nama	140.000.000,00	300 papan nama	520.257.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.36	Kegiatan Penghapusan Barang Daerah	Jumlah penghapusan / penjualan barang inventaris milik daerah	12 paket	1 paket	84.993.000,00	1 Paket	125.000.000,00	1 Paket	125.000.000,00	12 Paket	514.993.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.37	Peningkatan pengamanan, pengendalian dan pemanfaatan aset	Jumlah pengamanan aset pemda	430 kendaraan, 6 bidang tanah, 2 gedung (53 OPD)	48 OPD	424.965.000,00	48 OPD	500.000.000,00	53 SKPD	750.000.000,00	48 OPD	2.459.965.000,00		
				Sistem Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA)	Jumlah Laporan akhir hasil sensus barang	18 dokumen	0	-	0	-	0	-	18 dokumen	552.322.400,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan(out put)	Data Target Kinerja sampai dengan tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4.4.4.4.5.1.17.40	Pengolahan data barang milik daerah	Jumlah dokumen pengelolaan data BMD	12 dokumen	4 Dokumen	489.080.020,00	4 Dokumen	600.000.000,00	4 Dokumen	775.000.000,00	24 dokumen	2.323.385.020,00		
			4.4.4.4.5.1.17.41	Pembinaan Penatausahaan Aset Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Penatausahaan Aset Daerah	1.285 orang	300 orang	106.909.980,00	300 orang	150.000.000,00	300 orang	160.000.000,00	2.185 orang	632.213.980,00		
			4.4.4.4.5.1.17.42	Monitoring Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terinventarisir di Kabupaten Magelang	4.562 roda 2 ; 1.086 roda 4	R2 : 1.174 unit dan R4 : 307 unit	89.979.400,00	1.241 R2, 341 R4	135.000.000,00	1.241 R2, 341 R4	135.000.000,00	8.218 Roda Dua, 1.910 Roda 4	555.327.400,00		
			4.4.4.4.5.1.17.43	Penyusunan DKBMD/DKPBMD	Jumlah penyusunan Data DKBMD/ DKPBMD	53 SKPD	48 OPD	133.439.800,00	48 OPD	200.000.000,00	48 OPD	200.000.000,00	48 OPD	911.855.500,00		
			4.4.4.4.5.1.17.44	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Jumlah Prosentase Penyelesaian TGR di Kabupaten Magelang	30%	50%	70.828.000,00	50%	125.000.000,00	50%	125.000.000,00	50%	449.428.000,00		
Meningkatkan PAD serta Pendapatan Daerah lainnya	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah terutama dari 2 komponen Pendapatan Asli Daerah yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Persentase Peningkatan PAD	4.4.4.4.5.1.17.45	Pengelolaan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Pajak dan Retribusi	10 Jenis Pajak dan 1 Retribusi Daerah	8 jenis pajak dan 1 retribusi	155.821.000,00	8 jenis pajak dan 1 retribusi	230.000.000,00	8 jenis pajak dan 1 retribusi	300.000.000,00	8 jenis pajak dan 1 retribusi	915.821.000,00		
		Persentase Peningkatan PAD	4.4.4.4.5.1.17.46	Penyampaian SPPT dan DHKP	Jumlah SPT dan DHK PBB yang tersampaikan hingga desa	21 kecamatan dan 372 desa	21 kecamatan dan 372 desa	924.668.200,00	372 Desa/ Kelurahan	1.340.000.000,00	21 kecamatan dan 372 desa	1.340.000.000,00	372 Desa/ Kelurahan	5.596.938.200,00		
			4.4.4.4.5.1.17.47	Penerbitan SPPT dan DHKP	Jumlah SPT dan DHKP PBB	372 Desa/ Kelurahan	372 desa/kelurahan	364.323.000,00	372 Desa/ Kelurahan	640.000.000,00	372 desa/kelurahan	944.186.000,00	372 Desa/ Kelurahan	2.834.230.000,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan(out put)	Data Target Kinerja sampai dengan tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4.4.4.4.5.1.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Jumlah pemungutan PAD PBB di Kabupaten Magelang	21 kecamatan dan 372 desa	21 kecamatan dan 372 desa	1.376.793.280,00	372 Desa/ Kelurahan	1.978.400.000,00	21 kecamatan dan 372 desa	1.800.000.000,00	372 Desa/ Kelurahan	7.587.079.770,00		
			4.4.4.4.5.1.17.49	Penyelesaian dan Verifikasi Ketetapan Pajak dan Retribusi	Jumlah ketetapan Wajib Pajak	21 kecamatan dan 372 desa	21 kecamatan dan 372 desa	220.295.020,00	372 Desa/ Kelurahan	320.000.000,00	21 kecamatan dan 372 desa	320.000.000,00	372 Desa/ Kelurahan	1.334.938.020,00		
			4.4.4.4.5.1.17.50	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rakor dan Evaluasi Pendapatan Daerah	13 kali rakor	4 kali Rakor	120.487.340,00	4 rakor	198.000.000,00	4 kali Rakor	200.000.000,00	24 rakor	740.420.240,00		
			4.4.4.4.5.1.17.51	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah	10 jenis pajak daerah dan 1 retribusi daerah	10 jenis pajak daerah dan 1 retribusi daerah	80.828.000,00	10 jenis pajak daerah dan 1 retribusi daerah	130.000.000,00	10 jenis pajak daerah dan 1 retribusi daerah	130.000.000,00	10 jenis pajak daerah dan 1 retribusi daerah	493.432.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.52	Pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah	Jumlah jenis pajak yang diupdate	64.343 obyek PBB P2	8000 Obyek PBB-P2	396.992.000,00	8000 Obyek PBB P2	400.000.000,00	8000 Obyek PBB-P2	400.000.000,00	88.343 Obyek PBB P2	1.520.266.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.55	Rekonsiliasi penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan sebelum menjadi pajak daerah	Jumlah data pajak PBB yang akurat	21 kecamatan dan 372 desa	21 kecamatan dan 372 desa	548.266.380,00	372 Desa/ Kelurahan	793.000.000,00	21 kecamatan dan 372 desa	793.500.000,00	372 Desa/ Kelurahan	2.929.006.480,00		
			4.4.4.4.5.1.17.56	Penyusunan analisa pendapatan	Jumlah dokumen kajian analisa pendapatan	12 dokumen kajian potensi PAD	1 dokumen kajian potensi PAD	184.750.000,00	1 dokumen kajian potensi PAD	350.000.000,00	1 dokumen kajian potensi PAD	480.000.000,00	4 dokumen kajian potensi PAD	1.417.750.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.58	Pengelolaan Administrasi pemungutan pajak daerah untuk Kecamatan dan Desa	Jumlah pengelolaan administrasi data PBB di Kabupaten Magelang	21 kecamatan dan 372 desa	21 kecamatan dan 372 desa	2.140.000.000,00	372 Desa/ Kelurahan	2.766.233.480,00	21 kecamatan dan 372 desa	2.911.950.940,00	372 Desa/ Kelurahan	12.296.399.420,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan(out put)	Data Target Kinerja sampai dengan tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4.4.4.4.5.1.17.59	Pendaftaran dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak	Jumlah wajib pajak diKabupaten Magelang	877 WP baru, 3.449 WP daerah (4.326 wajib pajak daerah selain PBB, BPHTB, Gol C dan Catering)	1.357 wajib pajak daerah selain PBB, BPHTB, Gol C dan Catering	256.790.740,00	1.357 wajib pajak daerah selain PBB, BPHTB, Gol C dan Catering	400.000.000,00	1.357 wajib pajak daerah selain PBB, BPHTB, Gol C dan Catering	450.000.000,00	8.397 wajib pajak daerah selain PBB, BPHTB, Gol C dan Catering	1.569.765.240,00		
			4.4.4.4.5.1.17.61	Penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD	Jumlah RSU dan Puskesmas yang sudah BLUD	1 RSU dan 29 Puskesmas	1 RSU dan 29 Puskesmas	141.655.000,00	1 RSU dan 29 Puskesmas	220.000.000,00	1 RSU dan 29 Puskesmas	300.000.000,00	1 RSU dan 29 Puskesmas	1.111.655.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.79	Pembuatan Media Promosi / Reklame	Jumlah media promosi	2 buah	1 buah	422.132.000,00	1 buah	650.000.000,00	2 buah	1.000.000.000,00	6 buah	2.608.642.800,00		
		Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah	4.4.4.4.5.1.17.85	Pengendalian Perbendaharaan	Jumlah laporan pendapatan dan belanja dalam 1 tahun	24 laporan bulanan dan 224 laporan realisasi belanja langsung pertriwulan	248: 24 laporan bulanan dan 224 laporan realisasi belanja langsung pertriwulan	128.000.000,00	248: 24 laporan bulanan dan 224 laporan realisasi belanja langsung pertriwulan	200.000.000,00	248: 24 laporan bulanan dan 224 laporan realisasi belanja langsung pertriwulan	200.000.000,00	96 laporan bulanan dan 896 laporan realisasi belanja langsung pertriwulan	558.000.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.86	Penyusunan Raperda dan Raperbup Barang Milik Daerah	Jumlah Raperda/ Raperbup BMD	1 Raperda dan 1 Raperbup	1 Perda dan 1 Raperbup	61.583.000,00	1 Raperda dan 1 Raperbup	150.000.000,00	1 Perda dan 1 Raperbup	160.000.000,00	4 Perda dan 1 Raperbup	419.404.000,00		
		Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah	4.4.4.4.5.1.17.87	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi pengelolaan keuangan daerah dan klinik pengelolaan keuangan daerah	1 jenis aplikasi SIM Pengelolaan Keuangan Daerah	1 jenis aplikasi SIM Pengelolaan Keuangan Daerah	318.724.000,00	1 Jenis aplikasi SIM pengelolaan keuangan daerah dan 1 klinik pengelolaan keuangan daerah	540.000.000,00	1 Jenis aplikasi SIM pengelolaan keuangan daerah dan 1 klinik pengelolaan keuangan daerah	500.000.000,00	1 Jenis aplikasi SIM pengelolaan keuangan daerah dan 1 klinik pengelolaan keuangan daerah	2.191.840.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.95	Penyusunan Data Base Tanah	Jumlah Dokumen DataBase Tanah	0	1 Dokumen Tanah	up	1 Dokumen Tanah	150.000.000,00	1 Dokumen Tanah	150.000.000,00	3 Dokumen Tanah	300.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan(out put)	Data Target Kinerja sampai dengan tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4.4.4.4.5.1.17.96	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan	Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi belanja	1 Laporan keuangan daerah	1 Laporan keuangan daerah	60.000.000,00	1 Laporan keuangan daerah	67.000.000,00	1 Laporan keuangan daerah	60.000.000,00	4 Laporan keuangan daerah	247.000.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.97	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen sidur pengelolaan keuangan	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000,000	1 dokumen	75.000.000,000	1 dokumen	-	4 dokumen	257.365.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17.98	Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	0	1 Perda	42.000.000,00	1 Perda	120.000.000,00	1 Perda	120.000.000,00	4 Perda	332.000.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17	Pembentukan Basis Data SISMIOP	Jumlah Kecamatan yang menjadi pilot project pendataan	-		up		up	up		-	up		
			4.4.4.4.5.1.17	Percepatan Realisasi Anggaran	Jumlah Data Realisasi Anggaran yang Akurat	55 SKPD	50 OPD	50.000.000,00	50 OPD	50.000.000,00	50 OPD	50.000.000,00	50 OPD	205.859.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17	Klinik Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah % Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan	100%	100%	up	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	200.000.000,00		
			4.4.4.4.5.1.17	Analisa Penyusunan Nilai Zona Tanah	Jumlah analisa penilaian nilai zona tanah	100%	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	800.000.000,00		
				Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah dan Prosentase Peningkatan PAD	WDP ; 10,30%							WDP ; 10,30%	1.711.907.000,00		
				Pembuatan Media Promosi / Reklame	Jumlah media promosi	5 buah							5 buah	200.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan(out put)	Data Target Kinerja sampai dengan tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Penyusunan Analisa Pendapatan	Jumlah dokumen Kajian Analisa Pendapatan	1 dokumen kajian potensi PAD		-					1 dokumen kajian potensi PAD	219.577.000,00		
				Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak yang diupdate	PBB P2, BPHTB, Pajak air tanah		-		-			PBB P2, BPHTB, Pajak air tanah	664.149.000,00		
				Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebelum Menjadi Pajak daerah	Jumlah data pajak PBB yang akurat	21 kecamatan/ 372 desa							21 kecamatan/ 372 desa	387.043.000,00		
				Pembentukan Basis Data Sismiop	Jumlah kecamatan yang menjadi pilot project pendataan	1 kecamatan							1 kecamatan	241.138.000,00		
				URUSAN PARIWISATA												
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah dan Prosentase Peningkatan PAD	WDP ; 10,30%		-		-			WDP ; 10,30%	410.693.000,00		
				Fasilitasi Kerjasama Investasi	Jumlah analisa kajian investasi dan rancangan perjanjian kerjasama dengan investor	5 dokumen kajian (1 kajian teknis, 1 pelelangan, 1 taksiran kontribusi, 1 penilaian aset dan study kelayakan)		-		-			5 dokumen kajian (1 kajian teknis, 1 pelelangan, 1 taksiran kontribusi, 1 penilaian aset dan study kelayakan)	410.693.000,00		
				URUSAN PERDAGANGAN												

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan(out put)	Data Target Kinerja sampai dengan tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
							8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7											
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah dan Prosentase Peningkatan PAD	WDP ; 10,30%											
				Pengadaan Tanah	Jumlah tanah yang terbeli	1 bidang		up		up		up		1 bidang	17.422.760.000,00		
					TOTAL			17.681.957.260,00		24.672.269.480,00		27.474.126.740,00			157.773.123.870,00		